

LAPORAN

AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI

PEMERINTAH

(LAKIP)

TAHUN ANGGARAN 2021



DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU

SATU PINTU DAN TENAGA KERJA

TAHUN 2022

KATA PENGANTAR

Puji syukur dipanjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa atas berkah dan karunianya, sehingga Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Tahun 2021 Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja Kabupaten Kepulauan Selayar (DISPMPTSPTK) dapat di susun.

Penyusunan LAKIP merupakan kewajiban sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2010 Tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah untuk mempertanggung jawabkan pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya yang dipercayakan kepada pelaksana pemerintahan dalam mengelola perencanaan pembangunan daerah berdasarkan Rencana Strategis (RENSTRA).

Dengan telah disusunnya LAKIP Tahun 2021 ini, disampaikan ucapan terima kasih kepada para pihak yang telah membantu pelaksana kegiatan yang bekerja secara maksimal meskipun masih terdapat kekurangan disebabkan adanya kendala yang dihadapi dalam melaksanakan kegiatan selama tahun 2021.

Semoga LAKIP Dinas PMPTSPTK Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2021 ini dapat bermanfaat terutama untuk bahan evaluasi bagi yang berwenang untuk menilai kinerja staf dalam Organisasi Perangkat Daerah Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja Kabupaten Kepulauan Selayar.

Benteng, 25 januari 2022

Kepala Dinas PMPTSPTK

Muhammad Arsyad, S.Km., M.Kes., M.Sc.PH.
Pangkat : Pemula Tk.I
NIP.197504011999031010

DAFTAR ISI

	HALAMAN
KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. LATAR BELAKANG	1
B. MAKSUD DAN TUJUAN	2
C. GAMBARAN UMUM ORGANISASI PERANGKAT DAERAH	3
D. ISU-ISU STRATEGIS	12
 BAB II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA	
A. RENCANA STRATEGIS	13
1. Tujuan	19
2. Sasaran	19
3. Strategi	21
B. INDIKATOR KINERJA UTAMA	23
C. RENCANA KERJA TAHUN 2021	26
D. PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021	36
 BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	38
A. PENGUKURAN KINERJA	38
B. ANALISIS CAPAIAN KINERJA	39
C. REALISASI KEUANGAN	47
 BAB IV PENUTUP	63
 LAMPIRAN	
- PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022	

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu, dan Tenaga Kerja (DPMPTSPTK) Kabupaten Kepulauan Selayar ditetapkan berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Nomor 4 tahun 2020 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2020 Nomor 98, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Nomor 47), yang mempunyai fungsi melaksanakan perumusan dan menentukan kebijakan teknis di Bidang Penanaman Modal, PTSP dan Tenaga Kerja sebagaimana mewujudkan visi dan misi Kabupaten kepulauan Selayar tertuang pada Renstra tahun 2016 s/d 2021.

Pelaksanaan fungsi kelembagaan Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu, dan Tenaga Kerja (DPMPTSPTK) telah menerapkan dan melaksanakan RPJM, RKPD serta Renja sesuai dengan RENSTRA 2021-2026 (Renstra Tahun pertama), termasuk kinerja yang berkaitan dengan SPM yang telah dilaporkan sesuai target BKPM/Kementrian Investasi sampai dengan Tahun 2021.

Untuk memenuhi rencana kerja yang telah ditetapkan terutama yang berhubungan dengan Investasi, Pelayanan Perizinan, dan Penyerapan Tenaga Kerja pada Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu, dan Tenaga kerja (DPMPTSPTK) terdapat program dan kegiatan yang telah dilaksanakan selama Lima tahun dan kinerja tahunan. Untuk kinerja kegiatan capaian program harus terjabarkan dalam LKIP sehingga akan dapat diketahui dari target dan capaian kinerja tahun berjalan. Laporan kinerja berisikan rencana, target, capaian dan realisasi terhadap pengelolaan keuangan Perangkat Daerah (PD) sehingga dari capaian tersebut dapat terukur dan terevaluasi realisasi pelaksanaan program kegiatan yang telah dilaksanakan.

Sebagaimana Peraturan Pemerintah No. 8 Tahun 2006 tentang laporan keuangan dan kinerja Instansi Pemerintah, maka setiap akhir tahun anggaran untuk menyampaikan Laporan akuntabilitas Keuangan kepada Pemerintah Daerah (Bupati).

LAKIP Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja tetap mengacuh pada Keputusan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor: 239/IX/6/2003 baik sistematika penulisan maupun substansinya dan menyesuaikan dengan perubahan kondisi lingkungan, hal ini dilakukan sehubungan Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja yang dibentuk sebagai salah satu satuan kerja perangkat daerah sekaligus dalam rangka penerapan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, maka ditetapkanlah peraturan daerah Kabupaten Selayar Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan, Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar.

B. MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud dan Tujuan Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja Tahun 2021 sesuai dengan Permenpan no. 53 tahun 2014 adalah :

1. Untuk mengimplementasikan tujuan dan sasaran pemerintah Kabupaten sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Kantor Pelayanan Terpadu dan Penanaman Modal;
2. Menjadi landasan penentuan program dan kegiatan tahunan secara kronologis dan berkelanjutan;
3. Menjamin komitmen terhadap kesepakatan program yang sudah dibahas secara partisipatif antar semua komponen, melalui dari saat penyusunan kedalam Dokumen Renstra hingga penjabaran ke dalam Rencana Kinerja Tahunan (Renja).

Adapun tujuan dari laporan Kinerja Instansi Pemerintah ini adalah melaporkan kegiatan-kegiatan yang telah dilaksanakan oleh Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu, dan Tenaga Kerja (DPMPTSPTK) dalam rangka mengimplementasikan kinerja yang telah ditetapkan dalam bentuk program dan kegiatan sehingga dapat diketahui tingkat keberhasilan pencapaian dan kekurangannya untuk dievaluasi. Sehingga menjadi dasar bagi peningkatan kegiatan untuk tahun yang akan datang disamping untuk informasi bagi masyarakat yang memerlukan.

C. GAMBARAN UMUM OPD

Terbentuknya Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja Kabupaten Kepulauan Selayar diperkuat dengan beberapa peraturan perundang-undangan antara lain dikeluarkannya :

1. Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor: 503/125/PUOD tanggal 16 Januari 1997 tentang Pembentukan Unit Pelayanan Terpadu Perizinan di Daerah;
2. Instruksi Dalam Negeri Nomor 25 Tahun 1998 tentang Pelayanan Perizinan Satu Atap di Daerah;
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2006 tentang Pedoman 63/KEP/M.PAN/7/2003 tentang Pedoman Penyelenggaraan Publik; Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.
4. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2020 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2020 Nomor 98, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Nomor 47).

Dinas PMPTSPTK sebagai instansi yang memberikan pelayanan kepada masyarakat di Kabupaten Kepulauan Selayar memiliki gambaran berikut:

- a) Peringkat : A

- b) Alamat : Jalan Kemiri No. 2 Benteng Kabupaten Kepulauan Selayar
- c) Email : dpmptsptk.selayar@gmail.com
- d) Titik koordinat : S 6,11545, E 120,46325
- e) Foto kantor



1. SUMBER DAYA APARATUR

a. Keadaan Pegawai

Keadaan Pegawai Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja Kabupaten Kepulauan Selayar menurut kepangkatan tahun 2021 sebagai berikut :

• JPTP	= 0 orang
• Administrator (Kelas 12)	= 1 orang
• Administrator (Kelas 11)	= 4 orang
• Pengawas	= 16 orang
• Pelaksana	= 23 orang
• Fungsional	= 2 orang
Jumlah	= 46 orang

Untuk mengetahui sumberdaya Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja Kabupaten Kepulauan Selayar, berikut disajikan tabel 1 :

Tabel 1.1
Susunan Kepegawaian Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu
dan Tenaga Kerja Kabupaten Kepulauan Selayar
Berdasarkan Komposisi Golongan dan Eselon
Per Desember 2021

No	Tingkat pendidikan	Golongan			Jumlah	Eselon				Jumlah	Pegawai Kontrak	Pegawai Sukarela
		IV	III	II		II	III	IV	Staf			
1	Strata Dua (S2)	2	4	-	6	1	2	1	2	6	-	-
2	Strata Satu (S1)	4	21	-	25	-	3	13	9	25	23	-
3	Diploma	-	3	1	4	-	-	2	2	4	0	-
4	SLTA	1	2	8	11	-	-	0	11	11	23	-
Jumlah		7	30	9	46	1	5	16	24	46	46	-

Sumber data : Subag. Umum, Kepeg. dan Keuangan Dinas PMPTSPTK Kab. Kepulauan Selayar Tahun Desember 2021

Berdasarkan alokasi jumlah pegawai yang tersedia sebagaimana dalam tabel 1.1 tersebut maka dapat dikatakan bahwa jumlah pegawai pada Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja Kabupaten Kepulauan Selayar dapat dikatakan sudah presentatif hanya saja jika dilihat dari segi pendidikannya Sebagian belum sesuai kualifikasi dengan jabatannya.

b. Struktur Organisasi

Struktur organisasi Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Nomor 4 Tahun 2020 tentang Pembentukan, Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar.

Susunan Organisasi Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja terdiri dari :

1. Kepala Dinas;
2. Sekretaris terdiri dari;
 - a. Subbagian Program;
 - b. Subbagian Umum, Kepegawaian dan Hukum;
 - c. Subbagian Keuangan

3. Bidang Penanaman Modal terdiri atas;
 - a. Seksi Perencanaan dan Pengembangan Ikim Penanaman Modal;
 - b. Seksi Promosi Penanaman Modal;
 - c. Seksi Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal dan Informasi Penanaman Modal;
4. Bidang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Terdiri atas;
 - a. Seksi Pelayanan dan Perizinan dan Non Perizinan;
 - b. Seksi Pengembangan Layanan Perizinan dan Non Perizinan;
 - c. Seksi Pelaporan Layanan Perizinan dan Non Perizinan;
5. Bidang Pengaduan, Kebijakan, dan Pelaporan Layanan terdiri atas;
 - a. Seksi Pengaduan dan Informasi Layanan;
 - b. Seksi Kebijakan dan Penyuluhan Layanan;
 - c. Seksi Pelaporan dan Peningkatan Layanan;
6. Bidang Pelatihan Perluasan dan Penempatan Tenaga Kerja terdiri atas;
 - a. Seksi Pembinaan dan Produktifitas Tenaga Kerja;
 - b. Seksi Fasilitasi dan Perluasan Kesempatan Kerja;
 - c. Seksi Hubungan Industrial;
7. Kelompok Jabatan Fungsional;
8. Unit Pelaksana Teknis Dinas.

Kepala Dinas mempunyai Tugas membantu Bupati dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu, dan Tenaga Kerja yang menjadi kewenangan daerah dan Tugas pembantuan yang ditugaskan kepada Pemerintah Daerah. Untuk menyelenggarakan Tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Dinas menyelenggarakan Fungsi:

1. Perumusan kebijakan urusan pemerintahan bidang penanaman modal pelayanan terpadu satu pintu dan tenaga kerja;

2. Pelaksanaan kebijakan urusan pemerintahan bidang penanaman modal pelayanan terpadu satu pintu dan tenaga kerja;
3. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan urusan pemerintahan bidang penanaman modal pelayanan terpadu satu pintu dan tenaga kerja;
4. Pelaksanaan administrasi Dinas; dan
5. Pelaksanaan Fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai bidang tugasnya.

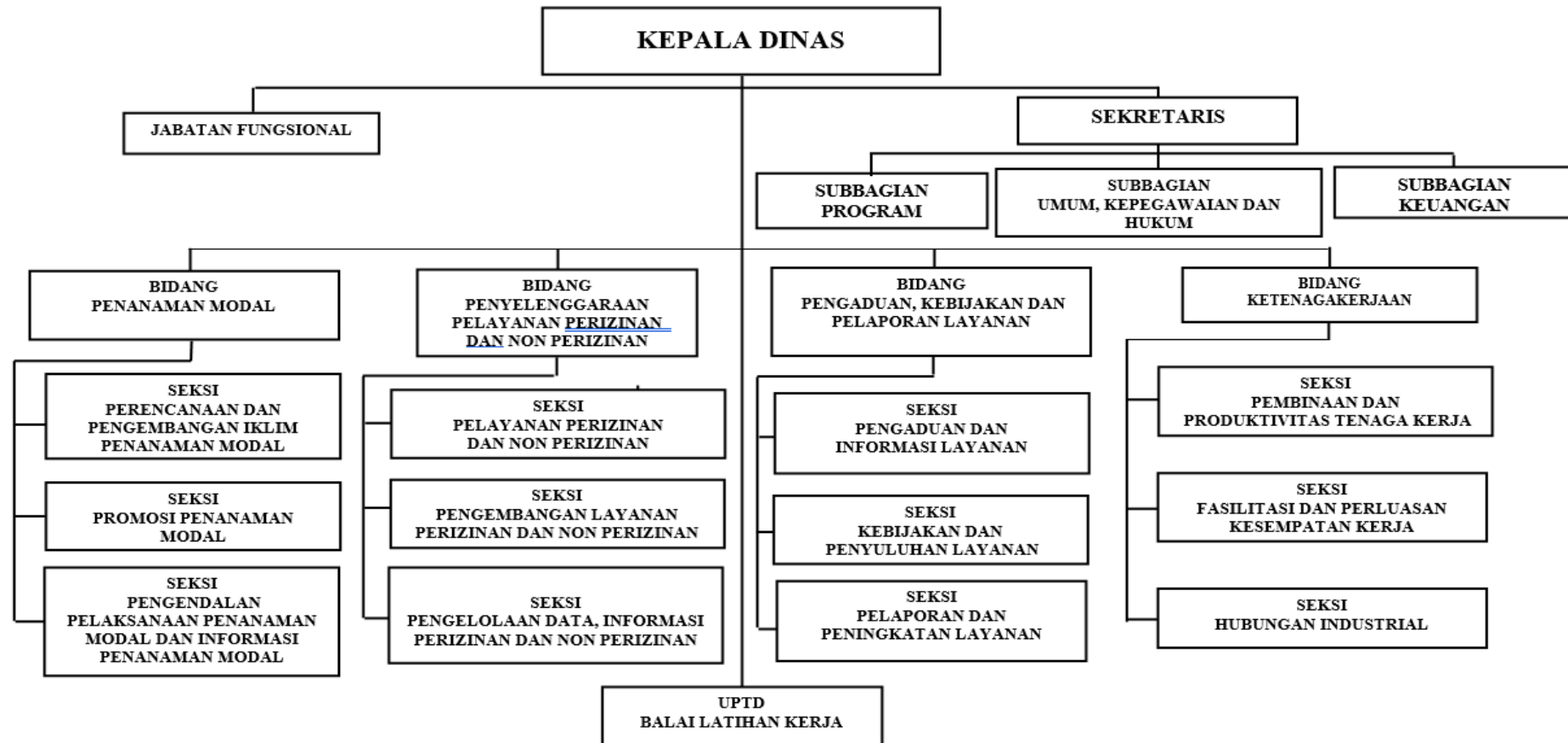
Uraian Tugas Kepala Dinas sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1), meliputi:

1. Menyusun rencana kegiatan Dinas sebagai pedoman dalam pelaksanaan Tugas;
2. Mendistribusikan dan memberi petunjuk pelaksanaan Tugas;
3. Memantau, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan Tugas dalam lingkungan Dinas untuk mengetahui perkembangan pelaksanaan Tugas;
4. Menyusun rancangan, mengoreksi, memaraf dan/atau menandatangani naskah dinas;
5. Mengikuti rapat sesuai bidang tugasnya;
6. Menyelenggarakan dan merumuskan kebijakan teknis penanaman modal;
7. Menyelenggarakan dan merumuskan kebijakan teknis penyelenggaraan pelayanan perizinan dan non perizinan;
8. Menyelenggarakan menyelenggarakan dan merumuskan kebijakan teknis pengaduan, kebijakan dan pelaporan layanan;
9. Menyelenggarakan dan merumuskan kebijakan teknis tenaga kerja;
10. Menyelenggarakan evaluasi dan pelaporan sesuai dengan lingkup tugasnya;
11. Menyelenggarakan administrasi Dinas sesuai dengan lingkup tugasnya;
12. Mengoordinasikan dan menyelenggarakan pemantauan, pengendalian, dan evaluasi kebijakan teknis penanaman modal, pelayanan terpadu satu pintu dan tenaga kerja;

13. Menyelenggarakan koordinasi dan konsultasi dengan lembaga pemerintah dan lembaga non pemerintah dalam rangka pelaksanaan Tugas dan Fungsi;
14. Menilai kinerja pegawai aparatur sipil negara sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
15. Menyusun laporan pelaksanaan Tugas Kepala Dinas dan memberi saran pertimbangan kepada pimpinan sebagai bahan perumusan kebijakan; dan
16. Menyelenggarakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

Gambar 1.1

**STRUKTUR ORGANISASI
DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU SATU PINTU DAN TENAGA KERJA
KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR**



BUPATI KEPULAUAN SELAYAR,

MUH. BASLI ALI

2. SARANA DAN PRASARANA

Sarana dan prasarana yang tersedia dalam mendukung pelaksanaan tugas pokok dan fungsi dinas sebagaimana tertera pada tabel 2 berikut ini :

Tabel 1.2
Data Asset dan Kondisinya
Dinas PMPTSPTK Kab. Kepulauan Selayar
Per Desember 2021

No	Jenis Perlengkapan	Kondisi		Jumlah	Tahun Perolehan
		Baik	Rusak		
1	Lemari Besi	18	-	18	2006,2009, 2011, 2012, 2015, 2017,2018
2	Lemari Kaca	13	-	13	2009,2015,2018
3	Lemari Piring	1	-	1	2009
4	Filling Cabinet	6	-	6	2006, 2009, 2018
5	Meja Kerja	78	3	81	2006,2014,2015, 2017,2018
6	Kursi Putar	13	-	13	2012, 2018, 2019
7	Kursi Tunggu	3	-	3	2009, 2019
8	Infocus	1	1	2	2013
9	Handycam	1	1	2	2012
10	Kursi tamu	3 set	-	3	2006, 2018
11	Komputer PC	69		69	2008,2013,2018
12	Laptop & Notebook	21	4	25	2011, 2014, 2018
	Hardisk	2		2	2011
13	Camera Digital	1	1	2	2012
14	Mesin Ketik	1	1	2	2009, 2015
15	Wireles	2	-	2	2009, 2015
16	Printer	25	5	30	2009, 2016, 2018
17	Pendingin Ac	10	1	11	2009, 2015, 2018
18	TV	6	-	6	2009, 2015, 2017,2018
19	Kursi Futura	144	-	144	2009,2012,2017, 2018, 2019
20	Faximili	1	-	1	2006
21	Sepeda Motor	17	-	17	2012, 2013, 2017, 2018, 2019
22	Mobil Innova	1	-	1	2009
23	Dispencer	4	-	4	2012,2016,2017
24	Running Teks	2	-	2	2016
25	Tangga Aluminium	4	-	4	2016
26	Scanner	2	-	2	2017, 2018
27	TV 29 Inc	1	-	1	2017
28	Meja ½ Biro	32	-	32	2017, 2018
29	Meja Biro	52	-	52	2017,208,2019
30	Kursi Kerja	29	-	29	2017,2018,2019
31	Kipas Angin	4	-	4	2017, 2018, 2019
32	Jaringan Aplikasi	1	-	1	2017

No	Jenis Perlengkapan	Kondisi		Jumlah	Tahun Perolehan
		Baik	Rusak		
33	Mesin Bor	7	-	7	2018
34	Mobil Pick Up	1		1	2008
35	Mobil Toyota Rush	1		1	2014
36	Kendaraan Bermotor Khusus IZusu	1		1	2019
37	Mesin gerinda	5		5	2016
28	Mesin Las Listrik	5		5	2016
29	Perkakas Pertukangan	486		486	2018
30	GPS	1		1	2014
31	Mesin Ketik	2		2	2009, 2015
32	Lemari Kaca	2		2	2014,2015
33	Papan Visual	7		7	2013,2014,2015
34	Papan pengumuman	1		1	2014
35	Mesin Absensi	1		1	2018
36	ATK	2		2	2013
37	AC	19		19	2019
38	Power suplay	1		1	2010
39	UPS	3		3	2013
40	Modem	3		3	2013
41	Proyektor	2		2	2010,2014
42	Handycam				
43	Layar proyektor	1			2008
44	Kompas geologi	1		1	2008
45	Peralatan pemetaan ukur	2		2	2014
46	Sound System	7		7	2018
47	Pesawat telepon	1		1	2011
48	Handy Talky	1		1	2008
49	Antena penerima VHF	1		1	2008
50	CCTV	1		1	2019

Sumber data : Kasubag Umum, Kpeg. Dan Keuangan. Dinas PMTSPTKKab. Kepulauan Selayar Desember 2021

Berdasarkan jumlah perlengkapan yang tersedia sebagaimana gambaran dalam tabel tersebut diatas, maka dapat dikatakan bahwa jumlah dan kualitas perlengkapan pada Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja Kabupaten Kepulauan Selayar belum representatif sebagaimana persyaratan yang dianjurkan permendagri No. 26 Tahun 2006 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu dan Penanaman Modal yang harus mempergunakan perangkat system komputerisasi yang berbasis LAN dan system pelayanan terkoneksi dengan Badan koordinasi Penanaman Modal Republik Indonesia dan Badan Koordinasi

Penanaman Modal Republik Indonesia dan Badan koordinasi Penanaman Modal Daerah Provinsi Sulawesi Selatan serta Sistem Pelayanan Informasi Penanaman Modal untuk penunjang pelayanan perizinan investasi.

D. ISU-ISU STRATEGIS

Beberapa permasalahan utama pada Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja (PMPTSPTK) dapat digambarkan sebagai berikut:

1. Ketersediaan Data, informasi, promosi investasi tentang potensi dan peluang investasi yang mudah diakses (Peta Investasi) serta kewenangan perizinan penanaman modal belum optimal;
2. Optimalisasi pemberian insentif dan kemudahan kepada para investor;
3. Sistem informasi Perizinan yang transparan dan mudah diakses dan digunakan oleh masyarakat;
4. Optimalisasi tugas Tim Teknis dan mekanisme proses persetujuan Perizinan;
5. Efektivitas kegiatan monitoring dan evaluasi untuk pengendalian pelaksanaan Perizinan;
6. Meningkatnya kesadaran Masyarakat terhadap perizinan;
7. Pentingnya memberikan pelatihan dan bantuan bagi masyarakat desa pada upaya peningkatan ekonomi dalam mengelola hasil perikanan, kelautan dan pariwisata;
8. Data kebutuhan tenaga kerja perusahaan bermanfaat untuk menyiapkan Tenaga kerja Baru;
9. Informasi pasar kerja memudahkan calon pekerja memperoleh informasi lowongan kerja;

BAB II

PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA

A. RENCANA STRATEGIS

Untuk menyatukan persepsi dan arah tindakan, maka pelaksanaan tugas pokok dan fungsi senantiasa harus dilandasi dengan visi, misi dan tujuan serta strategi yang jelas dirumuskan dalam Rencana Strategis Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja Tahun 2016-2021. Rencana Strategis Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja memuat penetapan visi, misi, tujuan, sasaran dan strategi yang dijabarkan dalam kebijakan dan program.

Visi dan misi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih merupakan landasan perumusan tujuan dan sasaran dengan memperhatikan program yang tertuju pada arah kebijakan pembangunan jangka panjang daerah pada periode berkenaan dalam RPJPD. Mengingat visi, misi, dan program kepala daerah merupakan hasil proses politik terpilihnya Kepala daerah dan wakil kepala daerah secara langsung oleh masyarakat, maka visi, misi, dan program kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih dijadikan sebagai substansi dan rujukan utama penyusunan RPJMD. Namun demikian, demi mendapatkan dokumen perencanaan yang baik, *manageable*, dan selaras dengan manajemen pemerintahan daerah, maka visi dan misi tersebut perlu dikembangkan dan dijabarkan sesuai prinsip perencanaan pembangunan daerah, agar tujuan dan sasaran pembangunan selama 5 (lima) tahun dapat dijabarkan secara efektif dalam mencapai tujuan utama pembangunan daerah.

Visi pembangunan daerah dalam RPJMD adalah visi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih yang disampaikan pada waktu pemilihan kepala daerah (pilkada). Visi Kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih seharusnya menggambarkan arah pembangunan atau kondisi masa depan daerah yang ingin

dicapai (*desired future*) dalam masa jabatan selama 5 (lima) tahun sesuai misi yang diemban. Pedoman utama penyusunan visi kepala daerah (saat mencalonkan) adalah bagaimana menyesuaikan dengan sasaran pokok sesuai dengan arah kebijakan pembangunan lima tahun periode berkenaan. Untuk mencapai indikator dan target dari sasaran pokok yang sama, kepemimpinan yang berbeda dapat menghasilkan visi dan misi yang berbeda pula, tergantung tekanan dan prioritas pembangunan masing-masing. Dengan demikian maka kedudukan RPJMD sangat penting untuk dijadikan landasan penyusunan dokumen RENSTRA SKPD yang dapat dioperasionalkan secara efektif dan efisien untuk mencapai tujuan dan sasaran pembangunan daerah selama 5 (lima) tahun ke depan.

Mengacu pada uraian di atas serta memperhatikan arah kebijakan tahun ketiga dalam RPJPD Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2005-2025 Selayar, RPJPD dan RPJM Propinsi Sulawesi Selatan 2019-2024, substansi RPJM Nasional 2015-2019, dinamika lingkungan strategis, aspirasi masyarakat dan pemerintah Kepulauan Selayar, serta visi misi Bupati/Wakil Bupati, maka ditetapkan Visi Pembangunan Kabupaten Kepulauan Selayar dalam RPJMD 2016-2021 sebagai gambaran realitas masa depan yang ingin dicapai dalam kurun waktu 5 tahun ke depan adalah :

“Terwujudnya Masyarakat Maritim yang Sejahtera Berbasis Nilai Keagamaan dan Kultural”

Dalam rumusan visi ini terdapat 3 (tiga) pokok visi yakni “masyarakat maritime sejahtera”, “nilai keagamaan” dan “nilai kultural”. “Masyarakat maritim yang sejahtera” adalah perwujudan visi yang hendak dicapai, “nilai keagamaan” dan “nilai kultural” adalah landasan nilai yang dijadikan acuan dalam pencapaian perwujudan visi kesejahteraan.

“Masyarakat maritim yang sejahtera” mengandung dua pengertian kondisi, yakni masyarakat Selayar sebagai masyarakat maritime dan masyarakat Selayar sebagai masyarakat yang sejahtera. Dalam pokok visi ini tercakup berbagai

fokus terkait kesejahteraan masyarakat dilihat dari pertumbuhan dan pemerataan ekonomi pada berbagai sektor serta kesejahteraan sosial, keterpenuhan berbagai infrastruktur wilayah, hasil-hasil pengelolaan sumberdaya alam yang unggul, serta produktivitas dan daya saing daerah.

“Berbasis nilai keagamaan” mengandung pengertian bahwa masyarakat Selayar dalam lima tahun kedepan akan semakin mewujudkan kehidupan beragama yang berkualitas dan rukun serta menempatkan nilai keagamaan sebagai sumber inspirasi dan motivasi serta basis nilai utama dalam kehidupan.

“Berbasis nilai kultural” mengandung pengertian bahwa dalam lima tahun kedepan kebudayaan daerah akan semakin berkembang dalam merespon dinamika kebudayaan nasional dan global. Dalam pokok visi ini tradisi dan kearifan lokal ditempatkan sebagai unsur yang akan terlestarikan secara dinamis.

Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi. Rumusan misi yang baik membantu lebih jelas penggambaran visi yang ingin dicapai dan menguraikan upaya-upaya apa yang harus dilakukan. Dalam suatu dokumen perencanaan, rumusan misi menjadi penting untuk memberikan kerangka bagi tujuan dan sasaran serta arah kebijakan yang ingin dicapai dan menentukan jalan yang akan ditempuh untuk mencapai visi. Secara teknokratis, misi dapat dirumuskan menjadi alasan mengapa organisasi ada. Suatu alasan menjelaskan jati diri yang sesungguhnya dari Pemerintah Daerah. Disini, misi juga dapat didefinisikan sebagai komitmen terbaik terhadap *stakeholder*. Ada banyak *stakeholder* pembangunan daerah, utamanya adalah masyarakat sebagai objek (tujuan) sekaligus subjek (pelaku) pembangunan. Rumusan misi dalam dokumen RPJMD dikembangkan dengan memperhatikan faktor-faktor lingkungan strategis, baik eksternal dan internal yang mempengaruhi serta kekuatan, kelemahan, peluang dan tantangan yang ada dalam pembangunan daerah.

Misi disusun untuk memperjelas jalan atau langkah yang akan dilakukan dalam rangka mencapai perwujudan visi. Oleh karena itu, pernyataan misi sebaiknya menggunakan bahasa yang sederhana, ringkas dan mudah dipahami tanpa mengurangi maksud yang ingin dijelaskan.

Perwujudan dari visi dapat dicapai dengan melaksanakan misi yang dirancang berdasarkan uraian pemaknaan visi sebagaimana telah dijelaskan di atas. Untuk memudahkan pelaksanaan misi, maka disinergikan antara kompetensi dan potensi yang dimiliki Kabupaten Kepulauan Selayar dengan kebijakan Pemerintah sebagaimana materi RPJM Nasional dalam bentuk, sembilan agenda prioritas yang disebut NAWACITA, kecuali pada Nawacita yang merupakan urusan Pemerintah.

Mengacu pada uraian-uraian tersebut di atas, maka dirumuskan Misi Pembangunan Kabupaten Kepulauan Selayar dalam periode 5 (lima) Tahun RPJMD 2016-2021 adalah, sebagai berikut:

1. Mewujudkan Nilai Keagamaan Sebagai Sumber Inspirasi Dan Basis Nilai Utama dalam Pembangunan Secara Terencana, Menyeluruh dan Berkelanjutan

Misi ini mencakup upaya-upaya dalam menciptakan situasi kondusif pada seluruh wilayah dan seluruh golongan masyarakat bagi kehidupan beragama; membangun pusat kajian agama dan budaya, mendorong pemenuhan sarana-prasarana dan fasilitas penyelenggaraan ibadah; memperkuat peran agama sebagai sumber motivasi, inspirasi dan nilai utama dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan;

2. Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih Dan Baik Melalui Pendekatan Aspiratif, Partisipatif Dan Transparan

Misi ini mencakup upaya-upaya dalam mewujudkan pemerintahan yang baik dalam bentuk menata struktur dan budaya organisasi serta sumberdaya manusia sebagai factor determinan bagi pemerintahan untuk bergerak secara sinergis dan produktif; menerapkan *e-government* dalam peningkatan

pelayanan public; meningkatkan profesionalitas dan kesejahteraan aparatur sipil negara (ASN) serta penerapan sistem *punishment and reward*; meningkatkan kualitas pemerintahan desa dalam pemberdayaan masyarakat; menjaga dan memelihara ketertiban serta ketenteraman dalam masyarakat; melakukan upaya penegakan hukum secara terpadu; dan membangun kesadaran politik serta meningkatkan kualitas penyelenggaraan demokrasi.

3. Mewujudkan Peningkatan Kualitas Kehidupan Masyarakat

Misi ini berfokus pada upaya-upaya dalam meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat, khususnya kualitas manusia. Tercakup didalamnya upaya-upaya pemberdayaan dan fasilitasi serta peningkatan akses masyarakat, khususnya masyarakat miskin terhadap sumber-sumber ekonomi; meningkatkan akses dan kualitas pelayanan pendidikan; meningkatkan akses dan kualitas pelayanan kesehatan, termasuk keluarga berencana (KB) dan kesejahteraan keluarga; meningkatkan kesetaraan gender dan perlindungan anak; dan membina kegiatan kepemudaan; serta membudayakan serta dan meningkatkan prestasi keolahragaan.

4. Mewujudkan Percepatan Pembangunan Infrastruktur dan Peningkatan Investasi Swasta di Sektor Perikanan, Kelautan dan Pariwisata

Misi ini mencakup upaya dalam pengembangan infrastruktur wilayah dan peningkatan aksesibilitas dari dan ke Selayar, serta meningkatkan prasarana dan sarana transportasi dan perhubungan yang terintegrasi wilayah daratan dan kepulauan; mempercepat peningkatan ketersediaan infrastruktur dasar yang meliputi jalan, listrik, air, dan energi; khusus pengembangan jalan pada wilayah daratan pulau Selayar, diarahkan agar terkoneksi dan searah dengan pengembangan sektor-sektor strategis lainnya; berkembangnya sentra-sentra Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Pariwisata serta Kawasan Industri Perikanan Terpadu, dan menjadikan Selayar sebagai pusat budi daya ikan karang; memberikan akses dan kemudahan berinvestasi; serta mendorong kerja sama

dengan Perguruan Tinggi dan Lembaga Non Pemerintah dalam upaya mempercepat dan mengoptimalkan dukungan kebijakan untuk terealisasinya kebijakan dan program daerah yang telah ditetapkan.

5. Mewujudkan Pengelolaan Potensi Sumber Daya Alam Sesuai Keunggulan Komparatif dan Kompetitif Daerah

Misi ini berfokus pada peningkatan posisi tawar dan letak strategis wilayah dalam rangka optimalisasi pemanfaatan sumberdaya kemaritiman, upaya umum dalam pengelolaan sumberdaya alam dan lingkungan hidup. Tercakup didalamnya upaya membangun sentra pengembangan komoditas pertanian, perkebunan, peternakan, perikanan dan kelautan; meningkatkan kesadaran dalam pencegahan, penanggulangan dan pemulihan pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup sebagai bagian dari upaya pelestarian fungsi lingkungan hidup.

6. Mewujudkan peningkatan produktivitas dan daya saing daerah serta sentra pertumbuhan di sektor agrobisnis dan agromaritim yang berbasis pada ekonomi kerakyatan

Misi ini berfokus pada upaya peningkatan produktivitas dari bidang usaha ekonomi yang berkembang khususnya yang berbasis kerakyatan. Tercakup di dalamnya upaya pengembangan keterampilan dan kemampuan teknis profesi berbasis teknologi pada masyarakat; dukungan permodalan dan manajemen bagi usaha kecil dan menengah dalam meningkatkan daya saing serta mencetak wirausahawan pada desa dan kelurahan.

7. Mewujudkan Pelestarian Tradisi dan Kearifan Lokal Melalui Strategi Kebudayaan

Misi ini berfokus pada strategi kebudayaan dalam melestarikan tradisi dan kearifan lokal daerah Kepulauan Selayar. Di dalamnya tercakup upaya pelestarian tradisi, pembinaan sejarah lokal dan penguatan lembaga adat; pembinaan kesenian daerah; serta pengelolaan cagar budaya dan museum.

Bertolak dari visi dan misi yang telah ditetapkan serta untuk mengatasi isu-isu strategis yang telah dikemukakan, maka selanjutnya akan ditetapkan tujuan dan sasaran sebagai berikut :

1. Tujuan

Tujuan merupakan penjabaran dari misi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 1 (satu) – 5 (lima) tahun ke depan.

Tujuan adalah sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu satu sampai lima tahun ke depan. Kantor Pelayanan Terpadu dan Penanaman Modal berkewajiban memberikan dukungan dan ikut bertanggungjawab atas tercapainya tujuan dan arah kebijakan umum Pemerintah Kabupaten, yang berhubungan dengan ekonomi dan Sumber Daya Alam Khususnya dalam Bidang Penanaman Modal adalah mendorong laju peningkatan investasi pada sektor swasta sehingga tercipta lapangan kerja baru yang dapat diakses oleh tenaga kerja lokal melalui penciptaan suasana yang aman dan kondusif.

Berdasarkan pernyataan tujuan di atas serta pernyataan visi dan misi Kabupaten Kepulauan Selayar ditetapkan dengan tujuan Kantor Pelayanan Terpadu dan Penanaman Modal sebagai berikut :

MISI KEEMPAT, Mewujudkan Percepatan Pembangunan Infrastruktur dan Peningkatan Investasi Swasta di Sektor Perikanan, Kelautan dan Pariwisata.

- a. Meningkatkan kualitas pelayanan Perizinan dan Non Perizinan;
- b. Mewujudkan pelayanan Perizinan dan Non Perizinan bidang Penanaman Modal.

2. Sasaran

Sasaran adalah penjabaran tujuan secara terukur, yaitu : sesuatu yang akan dicapai/dihasilkan oleh Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja Kabupaten Kepulauan Selayar dalam jangka waktu tahunan, sampai lima tahun mendatang.

Sasaran merupakan bagian integral dalam proses perencanaan strategis yang akan dicapai secara nyata melalui penetapan kebijakan, program dan kegiatan sehingga dapat memberikan arah terhadap, alokasi sumber daya yang telah dipercayakan kepada SKPD yang bersangkutan.

Berdasarkan pernyataan sasaran di atas serta pernyataan tujuan Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja ditetapkan sasarannya sebagai berikut :

Misi Keempat :

Mewujudkan Percepatan Pembangunan Infrastruktur dan Peningkatan Investasi Swasta di Sektor Perikanan, Kelautan dan Pariwisata

Tujuan 1 : Meningkatkan kualitas pelayanan perizinan dan non perizinan

Sasaran : - Terselenggaranya pelayanan perizinan dan non perizinan yang cepat, akurat dan transparan
- Meningkatnya Kinerja Aparatur KPTPM

Tujuan 2 : Mewujudkan pelayanan perizinan dan non perizinan bidang penanaman modal

Sasaran : Meningkatnya kualitas investasi yang memberikan iklim investasi yang kondusif serta promosi dan kerjasama investasi.

Strategi dan Kebijakan

Strategi dan kebijakan dalam Renstra SKPD KPTPM adalah strategi dan kebijakan untuk mencapai tujuan dan sasaran jangka menengah. Strategi dan kebijakan SKPD KPTPM harus selaras dengan strategi dan kebijakan daerah serta rencana program prioritas dalam rancangan awal RPJMD.

Strategi dan kebijakan jangka menengah SKPD KPTPM menjadi dasar perumusan kegiatan serta target kinerja hasil (*outcome*) program prioritas RPJMD yang menjadi tugas dan fungsi SKPD Dis. PMPTSPTK.

Strategi dan kebijakan Kantor Pelayanan Terpadu dan Penanaman Modal Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2016-2021 merupakan rumusan perencanaan komprehensif tentang bagaimana mencapai tujuan dan sasaran secara efektif dan efisien.

3. Strategi

Rumusan strategi merupakan pernyataan yang menjelaskan bagaimana sasaran akan dicapai. Strategi merupakan langkah-langkah yang berisikan program-program indikatif untuk mewujudkan visi dan misi, yang selanjutnya diperjelas dengan serangkaian arah kebijakan. Penetapan strategi dilakukan untuk menjawab cara pencapaian sasaran-sasaran pembangunan dan jangka waktu pencapaian sasaran-sasaran tersebut. Sebuah strategi dapat dilakukan untuk menjawab satu sasaran pembangunan ataupun lebih dari satu sasaran pembangunan, dengan mempertimbangkan aspek efektifitas dan efisiensi pencapaian target sasaran.

Misi Keempat :

Mewujudkan Percepatan Pembangunan Infrastruktur dan Peningkatan Investasi Swasta di Sektor Perikanan, Kelautan dan Pariwisata

Tujuan 1 : Meningkatkan kualitas pelayanan perizinan dan non perizinan

Sasaran : - Terselenggaranya pelayanan perizinan dan non perizinan yang cepat, akurat dan transparan;
- Meningkatnya Kinerja Aparatur Dis. PMPTSPTK

Strategi : Meningkatkan kualitas aparatur pelayanan sehingga mampu memberikan pelayanan prima kepada investor dengan cara mengubah pemahaman aparatur dari dilayani menjadi melayani.

Tujuan 2 : Mewujudkan pelayanan perizinan dan non perizinan bidang penanaman modal

- Sasaran** : Meningkatnya kualitas investasi yang memberikan iklim investasi yang kondusif serta promosi dan kerjasama investasi.
- Strategi** : - Menerapkan system pelayanan perizinan terpadu satu pintu sehingga tercipta pelayanan yang mudah, biaya murah, tranparan dan akuntabel
- Merancang dan menerbitkan peraturan daerah yang mampu memberikan kemudahan berinvestasi dan memberikan insentif yang menarik bagi para penanaman modal

Misi keenam :

Mewujudkan peningkatan produktivitas dan daya saing daerah serta sentra pertumbuhan di sektor agrobisnis yang berbasis pada ekonomi kerakyatan

- Tujuan** : 1. Meningkatnya keberdayaan tenaga kerja
- Sasaran** : 1 . Meningkatnya daya saing dan produktivitas tenaga kera
2. Meningkatnya daya saing dan peroduktivitas pelaku usaha ekonomi kerakyatan

Keterkaitan Tujuan, Sasaran, dan Strategi Renstra Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2016-2021

VISI Terwujudnya Masyarakat Maritim yang Sejahtera Berbasis Nilai Keagamaan dan Kultural		
MISI-4 : Mewujudkan Percepatan Pembangunan Infrastruktur dan Peningkatan Investasi Swasta di Sektor Perikanan, Kelautan dan Pariwisata dengan tujuan pokok memberikan akses dan kemudahan berinvestasi		
TUJUAN	SASARAN	STRATEGI
1. Meningkatkan kualitas pelayanan perizinan dan non perizinan	1. Terselenggaranya pelayanan perizinan dan non perizinan yang cepat, akurat dan	1.Meningkatkan kualitas aparatur pelayanan sehingga mampu memberikan pelayanan prima kepada investor dengan cara mengubah pemahaman aparatur dari dilayanai menjadi melayani
	2. Meningkatnya kinerja aparatur KPTPM	

2. Mewujudkan pelayanan perizinan dan non perizinan Bidang Penanaman Modal	Meningkatnya kualitas investasi yang memberikan yang memberikan iklim investasi yang kondusif serta promosi dan kerjasama investasi	1. Menerapkan system pelayanan perizinan terpadu satu pintu sehingga tercipta pelayanan yang mudah, biaya murah, transparan dan akuntabel 2. Merancang dan menerbitkan peraturan daerah yang mampu memberikan kemudahan berinvestasi dan memberikan insentif yang menarik bagi para penanam modal
MISI-6 : Mewujudkan peningkatan produktivitas dan daya saing daerah serta sentra pertumbuhan di sektor agrobisnis yang berbasis pada ekonomi kerakyatan		
TUJUAN	SASARAN	STRATEGI
1. Meningkatkan keberdayaan tenaga kerja	1.Meningkatnya daya saing dan produktivitas tenaga kerja	1. Meningkatkan kualitas aparatur pelayanan sehingga mampu memberikan pelayanan prima kepada investor dengan cara mengubah pemahaman aparatur dari dilayani menjadi melayani
	2. Meningkatnya daya saing dan produktivitas pelaku usaha ekonomi kerakyatan	

B. INDIKATOR KINERJA UTAMA

Mewujudkan pengukuran dan peningkatan kinerja serta lebih meningkatkan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, maka Dinas PMPTSPTK perlu menetapkan Indikator Kinerja Utama (IKU). IKU merupakan indikator yang digunakan dalam mengukur tujuan dan sasaran strategis pemerintahan daerah dan OPD. IKU menggambarkan target pencapaian indikator OPD sesuai *core business* OPD terkait dan tertuang dalam dalam tugas dan fungsi serta kewenangan utama organisasi.

Berdasarkan Keputusan Kepala DPMPTSPTK tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama dan Indikator Kinerja Individu Di Lingkungan DPMPTSPTK Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2021 -2026 sebagai berikut :

INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)
DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU SATU PINTU DAN TENAGA
KERJA

1	Nama Oganisasi	:	Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu, Satu Pintu dan Tenaga Kerja
2	Tugas	:	Membantu Bupati Kabupaten Kepulauan Selayar dalam urusan pemerintahan bidang Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu, dan Tenaga Kerja dan tugas pembantuan yang ditugaskan kepada pemerintah daerah.
3	Fungsi	:	a. Perumusan Kebijakan urusan bidang Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja;
			b. Pelaksanaan kebijakan urusan pemerintahan bidang Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja;
			c. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan urusan pemerintahan bidang Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja;
			d. Pelaksanaan administrasi Dinas;
			e. Pelaksanaan tugas-tugas pembantuan dari pemerintah yang menjadi tanggung jawabnya;
			f. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait tugas dan fungsinya.

NO	Sasaran Strategis	Indikator kinerja	TARGET Tahun 2016	TARGET Tahun 2017	TARGET Tahun 2018	TARGET Tahun 2019	TARGET Tahun 2020	TARGET Tahun 2021
I.	Meningkatnya Investasi	Nilai Investasi PMDN (rupiah)	38.662.070.000	42.528.277.500	46.781.105.000	51.459.215.500	56.605.136.000	62.256.215.500
		Nilai Investasi PMA (\$)	1.450.000	2.000.000	3.000.000	5.250.000	10.500.000	21.000.000
II.	Meningkatnya daya saing dan produktivitas Tenaga Kerja :	Rasio daya serap tenaga kerja (%)	6,40	10,48	16,30	27,95	40,76	1.750
		Tenaga Kerja yang ditempatkan	275	540	700	1.200	1.750	2.250
III.	Meningkatnya perlindungan tenaga kerja	Jumlah lembaga ketenagakerjaan yang dilindungi dan di kembangkan	-	173.500.000	106.000.000	705.000.000	705.000.000	705.000.000
IV.	Meningkatnya kualitas pelayanan publik	Indeks Kepuasan Masyarakat (IPM)	85 %	85 %	90 %	90 %	95 %	95 %

Tabel 2.3
Indikator Kinerja Utama (IKU)
Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja

N0	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama (IKU)	Formula
1	Meningkatnya Investasi	Nilai Investasi PMDN (Rp Juta)	Jumlah Nilai Investasi PMDN
		Nilai Investasi PMA (\$ Juta)	Jumlah Nilai Investasi PMA
		Persentase Peningkatan Nilai Investasi PMDN	Realisasi PMDN tahun evaluasi dikurangi realisasi PMDN tahun sebelum evaluasi dibagi realisasi PMDN sebelum evaluasi dikali 100%
2	Meningkatnya daya saing dan produktivitas Tenaga Kerja :	Rasio Daya Serap Tenaga Kerja	Jumlah tenaga kerja yang bekerja pada Perusahaan PMA/ PMDN dibagi Jumlah seluruh PMA/PMDN
		Tenaga Kerja yang ditempatkan	Jumlah Tenaga Kerja yang ditempatkan
3	Meningkatnya perlindungan tenaga kerja	Jumlah tenaga kerja yang dilindungi	Jumlah Peserta BPJS Ketenagakerjaan
4	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Masyarakat	Indeks Kepuasan Masyarakat	Jumlah Nilai IKM

C. RENCANA KERJA TAHUN 2021

Berdasarkan Rencana Kinerja (RENJA) Tahun 2021 telah ditetapkan 9 sasaran dengan dukungan Program, Kegiatan, dan Subkegiatan sebagai salah satu Stratejik pencapaian sasaran. Rincian sasaran berikut indikator kinerja, satuan dan targetnya dapat dilihat pada tabel Rencana Kinerja 2021.

Guna mengarahkan pencapaian secara efektif, maka disusunlah program dan kegiatan yang implementasinya diatur melalui kebijakan/*policy* yang ditetapkan oleh pimpinan. Strategi pencapaian sasaran tersebut dijelaskan untuk masing-masing sasaran.

Sasaran ini dilaksanakan melalui kebijakan mendorong pemerintahan yang dapat mengefektifkan pelaksanaan otonomi daerah dengan rincian program dan kegiatan sebagai berikut :

RENCANA KERJA TAHUNAN 2021
DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
DAN TENAGA KERJA KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Program Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator	Target Capaian	Anggaran
1	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Masyarakat	Indeks Kepuasan Masyarakat	1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Capaian Kinerja (%)	50,91%	
	Meningkatnya tertib administrasi pengelolaan keuangan dan asset daerah	Laporan Keuangan OPD sesuai SAP		Persentase Capaian Kinerja Keuangan (%)	79,35%	
			a. Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Ketersediaan Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	100%	Rp. 49.158.000,-
			1) Penyusunan Dokumen Perencanaan perangkat daerah	Jumlah Dokumen Renja dan Perubahan Renja yang disusun dan ditetapkan, jumlah Dokumen Renstra PD yang di susun dan ditetapkan	2 Dok	Rp. 4.351.000
			2) Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA SKPD	Jumlah Dokumen RKA pokok yang tersusun	1 Dok	Rp. 3.160.000
			3) Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA perubahan SKPD	Jumlah Dokumen RKA perubahan yang tersusun	1 Dok	Rp. 4.620.000
			4) Koordinasi dan Penyusunan Dokumen DPA SKPD	Jumlah Dokumen DPA pokok yang tersusun	1 Dok	Rp. 3.820.000
			5) Koordinasi dan Penyusunan Dokumen DPA perubahan SKPD	Jumlah Dokumen DPA perubahan yang tersusun	1 Dok	Rp. 3.820.000
			6) Koordinasi dan Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Jumlah Dokumen Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD yang tersusun dan dilaporkan	1 Dok	Rp. 24.317.000
			7) Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen evaluasi kinerja (LAKIP, LPPD, LKPJ,	4 Dok	Rp. 5.000.000

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Program Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator	Target Capaian	Anggaran
				RKPD SKPD) perangkat daerah yang tersusun dan dilaporkan		
			b. Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah laporan keuangan yang akuntabel yang disusun	1 Dok	Rp. 4.385.366.000,-
			1) Penyediaan gaji dan tunjangan ASN	Jumlah ASN yang menerima gaji dan tunjangan		Rp. 4.351.866.000,-
			2) Koordinasi dan Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Tersedianya laporan keuangan akhir tahun	1 Dok	Rp. 3.000.000,-
			3) Koordinasi dan Penyusunan laporan keuangan bulanan/ semesteran SKPD	Jumlah laporan keuangan bulanan/ semesteran yang tersedia	14 Dok	Rp. 3.500.000,-
			c. Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah Pada Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan administrasi umum Perangkat Daerah	100%	Rp. 12.649.000,-
			1) Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Barang milik Daerah SKPD yang disusun dan dilaporkan	2 Dok	Rp. 5.000.000,-
			2) Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	Jumlah laporan barang milik daerah yang disusun dan dilaporkan	2 Dok	Rp. 4.500.000,-
			3) Penatausahaan Barang Milik Daerah Pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan barang milik daerah yang disusun dan dilaporkan	2 Dok	Rp.3.149.000,-
			d. Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan administrasi kepegawaian	100%	Rp. 38.500.000,-
			1) Pendidikan dan pelatihan pegawai berdasarkan tugas dan fungsi	Jumlah pegawai yang mengikuti pendidikan dan pelatihan berdasarkan tugas dan fungsi	1 Pegawai	Rp. 10.000.000,-

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Program Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator	Target Capaian	Anggaran
			2) Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan	Jumlah sosialisasi peraturan perundang-undangan yang dilaksanakan	Pegawai	Rp. 0,-
			3) Bimbingan Teknis implementasi Peraturan Perundang-undangan	Jumlah pegawai yang mengikuti bimtek implementasi peraturan perundang-undangan	20 orang	Rp. 28.500.000,-
			e. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan administrasi umum Perangkat Daerah	100%	Rp. 386.748.300,-
			1) Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Jumlah barang Cetak dan Penggandaan yang tersedia	2 Jenis	Rp. 22.627.300,-
			2) Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Jumlah bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang tersedia	Jenis	Rp. 15.000.000,-
			3) Penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	Jumlah rapat koordinasi dan konsultasi SKPD yang terselenggara	418 SPD	Rp. 349.121.000,-
			f. Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase pemenuhan sarana prasarana perkantoran yang tersedia	100%	528.568.100,-
			1) Pengadaan kendaraan dinas operasional atau lapangan	Jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang tersedia	2 Unit	Rp. 50.000.000,-
			2) Pengadaan mebel	Jumlah peralatan mobiler yang tersedia	48 Unit	Rp. 124.975.000,-
			3) Pengadaan peralatan dan mesin lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin yang tersedia	96 Unit	Rp. 353.593.100,-
			g. Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemenuhan administrasi perkantoran	100%	Rp. 868.924.600,-
			1) Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Jumlah layanan telepon, listrik, dan air yang tersedia	3 Jenis layanan	Rp. 104.684.000,-
			2) Penyediaan jasa pelayanan umum	Jumlah Layanan umum	3 Jenis layanan	Rp. 764.240.600,-

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Program Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator	Target Capaian	Anggaran
			kantor	Kantor yang tersedia		
			h. Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah barang milik daerah yang dipelihara	32 Unit	Rp. 600.433.000,-
			1) Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan, dan pajak kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan	Jumlah kendaraan perorangan Dinas atau kendaraan dinas jabatan yang terpelihara	1 Unit	Rp. 75.438.000,-
			2) Pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya	Jumlah Peralatan dan mesin yang terpelihara	5 Jenis	Rp. 52.100.000,-
			3) Pemeliharaan/rehabilitasi gedung kantor dan bangunan lainnya	Jumlah sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang terpelihara	3 Unit	Rp. 472.895.000,-
2	Meningkatnya Kerjasama investasi	Nilai Investasi PMDN (Rp. Juta Rupiah)	Program Promosi Penanaman Modal	Jumlah Investor PMDN/PMA	10	Rp. 206.339.000,-
		Nilai Investasi PMA (\$ Juta)	Kegiatan Penyelenggaraan promosi penanaman modal yang menjadi kewenangan daerah kabupaten/ kota	Jumlah kegiatan Penerimaan Misi penanaman modal	5 kali	Rp.226.339.000,-
			Penyusunan Strategi Promosi Penanaman Modal	Jumlah dokumen strategi promosi penanaman modal yang tersusun	1 Dok	Rp. 50.000.000,-
			Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Kegiatan seminar bisnis, forum, one on one meeting yang dilaksanakan	0	Rp. 0,-
				Kegiatan pameran penanaman modal	1 Kali	Rp. 156.339.000,-
			Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal	Jumlah Nilai Realisasi Investasi (PMDN/PMA) (Rp. Juta Rupiah)	39.200	Rp. 322.573.000,-
			Kegiatan Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah Nilai Realisasi Investasi (PMDN/PMA) (Rp. Juta Rupiah)	39.200	Rp. 322.573.000,-
			Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan	Jumlah perusahaan	100 Pelaku usaha	Rp. 45.600.000,-

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Program Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator	Target Capaian	Anggaran
			Pelaksanaan Penanaman Modal	PMDN/PMA usaha yang terpantau		
			Koordinasi dan Sinkronisasi Pembinaan Pelaksanaan Penanaman Modal	Jumlah Perusahaan PMDN/PMA yang terfasilitasi	182 Pelaku Usaha	Rp. 185.773.000,-
			Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Penanaman Modal	Jumlah Perusahaan PMDN/PMA yang diawasi	50 Pelaku usaha	Rp. 91.200.000,-
			Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal	Persentase Potensi untuk peluang Investasi daerah (%)	'30%	Rp. 0,-
			Kegiatan Penetapan Pemberian Fasilitas/ insentif di bidang penanaman modal yang menjadi kewenangan daerah kab/ kota	Jumlah Perusahaan yang Mendapatkan Pemberian Fasilitas/ Insentif Dibidang Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah		Rp. 0,-
			Penetapan Kebijakan Daerah mengenai Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal	Jumlah Perusahaan yang Mendapatkan Pemberian Fasilitas/ Insentif Dibidang Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah		Rp. 0,-
			Evaluasi Pelaksanaan Pemberian fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal	Jumlah laporan evaluasi pelaksanaan pemberian fasilitas/insentif yang tersedia		Rp. 0,-
			Program Pelayanan Penanaman Modal	Persentase Izin yang diterbitkan (%)	100%	Rp.104.560.000,-
			Kegiatan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan secara Terpadu Satu Pintu di Bidang Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Penerbitan izin perizinan dan non perizinan	2123 Izin	Rp.104.560.000,-
			Penyediaan Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi	Jumlah izin yang terbit	2123 Izin	Rp. 54.560.000,-

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Program Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator	Target Capaian	Anggaran
			secara Elektronik			
			Pemantauan Pemenuhan Komitmen Perizinan dan Non Perizinan Penanaman Modal	Jumlah Dokumen Kegiatan pemantauan Komitmen Perizinan Penanaman Modal yang tersedia	11 Dokumen	Rp. 35.000.000,-
			Penyediaan layanan konsultasi dan pengelolaan pengaduan masyarakat terhadap pelayanan terpadu perizinan dan non perizinan	Jumlah Dokumen Kegiatan Konsultasi perizinan dan non perizinan penanaman modal yang tersedia	11 Dokumen	Rp. 15.000.000,-
			Program Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal	Persentase pemenuhan permintaan data dan informasi yang diterima secara online dan terintegrasi (%)	100%	Rp. 12.000.000,-
			Kegiatan Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase pemenuhan permintaan data dan informasi yang diterima	100%	Rp. 12.000.000,-
			Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegarsi secara Elektronik	Jumlah laporan berupa data dan informasi perizinan dan non perizinan provinsi kab/kota	14 Laporan	Rp. 12.000.000,-
4	Meningkatnya daya saing dan produktivitas tenaga kerja	Rasio Daya Serap Tenaga Kerja	Program Perencana Tenaga Kerja, dengan pagu Anggaran	Persentase kegiatan yang mengacu pada RTK (%)	50%	Rp. 15.800.000,-
		Tingkat Produktivitas tenaga kerja	Kegiatan Penyusunan Rencana Tenaga Kerja	Jumlah kegiatan yang mengacu pada RTK	2 Dok	Rp. 15.800.000,-
			Penyusunan rencana tenaga kerja makro	Dokumen perencanaan tenaga kerja Makro kab/kota yang tersedia	1 Dok	Rp. 15.800.000,-
				Persentase akurasi proyeksi indikator dalam rencana tenaga kerja.	100%	100%
			Program Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja	Persentase Tenaga Kerja yang Bersertifikat Kompetensi (%)	0,40%	Rp. 496.803.000,-

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Program Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator	Target Capaian	Anggaran
				Tingkat Produktivitas Tenaga Kerja	41,68%	
			Kegiatan Pelaksanaan Pelatihan Berdasarkan Unit Kompetensi	Jumlah pelatihan yang terlaksana dan bersertifikat kompetensi	10 Pelatihan	Rp. 496.803.000,-
			Proses pelaksanaan pendidikan dan pelatihan keterampilan bagi pencari kerja berdasarkan klaster kompetensi	Jumlah penerapan program PBK dengan kualifikasi klaster		Rp. 85.446.000,-
				Jumlah lulusan bersertifikat pelatihan	80 orang	
				Jumlah Lulusan bersertifikat kompetensi	160 orang	
				Jumlah Calon Pekerja Migran Indonesia		
				Jumlah Calon Pekerja Migran Indonesia (CPMI)/Calon Tenaga Kerja Indonesia (CTKI)		
				Jumlah Penganggur yang dilatih		
			Koordinasi Lintas lembaga dan Kerja sama dengan Sektor Swasta untuk Penyediaan Instruktur serta Sarana dan Prasarana Lembaga Pelatihan Kerja	Jumlah kelompok Alumni BLK yang memperoleh Bantuan Peralatan	11 Kelompok	Rp. 365.449.000,-
				Persentase LPK yang terakreditasi		
				Persentase Instruktur bersertifikat kompetensi	6 orang	
				Rasio Jumlah instruktur terhadap peserta pelatihan		
				Persentase LPK yang memiliki perizinan		
			Kegiatan Pengukuran produktivitas tingkat daerah kab/kota	Jumlah perusahaan yang diukur produktivitas tenaga kerja	2 Perusahaan	Rp. 45.908.000,-
			Pengukuran Kompetensi dan Produktivitas	Jumlah Data tingkat	1 Dok.	Rp. 45.908.000,-

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Program Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator	Target Capaian	Anggaran
			Tenaga Kerja	produktivitas total yang tersedia		
			Program Penempatan Tenaga Kerja,	Persentase tenaga kerja yang ditempatkan	12,50%	Rp.11.648.000,-
			Kegiatan Pelayanan Antarakerja di Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah tenaga kerja yang mendapat pelayanan antarkerja	20 orang	Rp. 11.648.000,-
			Penyelenggaraan Unit Layanan Disabilitas Ketenagakerjaan	Jumlah Penyelenggaraan Unit Layanan Disabilitas Ketenagakerjaan	2 layanan	Rp. 11.648.000,-
			Kegiatan Pengelolaan Informasi Pasar Kerja	Jumlah pencari kerja melalui aplikasi informasi kerja	0	0
			Pelayanan dan Penyediaan Informasi Pasar Kerja Online	Jumlah lowongan kerja yang tersedia di wilayah kab/kota	0	0
5	Meningkatnya kualitas hubungan kerja antara tenaga kerja dan perusahaan	Persentase penyelesaian perselisihan Hubungan Industrial	Program Hubungan Industrial	Persentase Perusahaan yang menerapkan tata kelola perusahaan yang layak	0,30%	79.547.000,-
		Persentase kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan	Kegiatan Pengesahan peraturan perusahaan dan pendaftaran perjanjian kerja bersama untuk yang mempunyai wilayahbkerja lebih dari 1(satu) Kab/Kota	Jumlah perusahaan yang memiliki Peraturan Perusahaan	5 Perusahaan	Rp. 61.677.000,-
			Pengesahan Peraturan Perusahaan bagi Perusahaan	Jumlah perusahaan yang telah memiliki Peraturan Perusahaan (PP)	5 Perusahaan	Rp. 27.900.00,-
				Jumlah perusahaan yang telah memiliki Perjanjian Kerja Bersama (PKB)		
				Jumlah perusahaan yang sudah menyusun		
				Jumlah perjanjian kerja yang disahkan oleh dinas		

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Program Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator	Target Capaian	Anggaran
				bidang ketenagakerjaan kab/kota		
			Penyelenggaraan Pendataan dan Informasi Sarana Hubungan Industrial dan Jamsostek serta Pengupahan	Jumlah tenaga kerja yang telah terdaftar sebagai peserta BPJS Ketenagakerjaan	69.858	Rp. 33.777.000,-
				Jumlah tenaga kerja khusus terdaftar dalam satu kab/kota		
			Kegiatan Pencegahan dan penyelesaian perselisihan hubungan industrial, mogok kerja dan penutupan perusahaan yang berakibat/ berdampak pada ekepntingan di 1 (satu) daerah provinsi	Jumlah bimbingan teknis/sosialisasi/FGD tata cara pencegahan dan penyelesaian perselisihan hubungan industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang terlaksana	1 kali	Rp. 17.870.000,-
			Pencegahan Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di Satu Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah bimbingan teknis/sosialisasi/FGD tata cara pencegahan dan penyelesaian perselisihan hubungan industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang terlaksana	1 kali	Rp. 17.870.000,-
				Jumlah perselisihan hubungan industrial		

D. PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021

Perjanjian Kinerja pada dasarnya adalah pernyataan komitmen yang merepresentasikan tekad dan janji untuk mencapai kinerja yang jelas dan terukur dalam rentang waktu satu tahun tertentu dengan mempertimbangkan sumber daya yang dikelola.

Tujuan khusus penetapan kinerja antara lain adalah :

- a. Meningkatkan akuntabilitas, transparansi dan kinerja aparatur;
- b. Sebagai wujud nyata komitmen antara penerima amanah dengan pemberi amanah;
- c. Sebagai dasar penilaian keberhasilan/kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran organisasi;
- d. Menciptakan tolak ukur kinerja sebagai dasar evaluasi kinerja aparatur.

Berikut ini diuraikan Indikator Kinerja Utama Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu, dan Tenaga kerja selama tahun 2021.

NO	Sasaran Strategis	Indikator kinerja	TARGET Tahun 2020
I.	Meningkatnya Investasi	Nilai Investasi PMDN (rupiah)	62.256.215.500
		Nilai Investasi PMA (\$)	21.000.000
		Kenaikan/ penurunan realisasi PMDN	77,20%
II.	Meningkatnya daya saing dan produktivitas Tenaga Kerja :	Rasio daya serap tenaga kerja (%)	50,51 %
		Tenaga Kerja yang ditempatkan	2.250
III.	Meningkatnya perlindungan tenaga kerja	Jumlah Tenaga kerja yang dilindungi	69.858
IV.	Meningkatnya kualitas pelayanan publik	Indeks Kepuasan Masyarakat (IPM)	95 %

**PROGRAM KERJA DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU SATU
PINTU DAN TENAGA KERJA
TAHUN ANGGARAN 2021**

NO.	PROGRAM	ANGGARAN
1.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Rp. 6.843.277,-
2.	Program Promosi Penanaman Modal	Rp. 206.339.000,-
4.	Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal	Rp. 0,-
5.	Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal	Rp. 322.573.000,-
6.	Program Pelayanan Penanaman Modal	Rp. 104.560.000,-
7.	Program Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal	Rp. 18.960.000,-
8	Program Perencana Tenaga Kerja	Rp. 15.800.000,-
9.	Program Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja	Rp. 496.803.000,-
10.	Program Penempatan Tenaga Kerja	Rp. 11.648.000,-
11.	Program Hubungan Industrial	Rp. 79.547.000,-
	TOTAL	Rp. 7.973.792.000,-

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

A. PENGUKURAN KINERJA

Pengukuran capaian kinerja dilaksanakan dengan membandingkan antara Realisasi Kinerja dengan Target Kinerja pada tahun 2021.

$$\% \text{ Pencapaian kinerja} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Rencana}} \times 100\%$$

Untuk indikator “persentase pegawai yang mendapatkan hukuman disiplin” menggunakan cara perhitungan yang berbeda karena semakin kecil capaian, semakin baik kinerja yang dicapai.

$$\% \text{ Pencapaian kinerja} = \frac{\text{Rencana} - (\text{Realisasi} - \text{Rencana})}{\text{Rencana}} \times 100\%$$

Predikat nilai capaian indikator skala pengukuran dikelompokan dalam skala pengukuran ordinal sebagai berikut :

Tabel 3.1.
Skala Nilai Peringkat Kinerja

No	Interval Nilai Realisasi Kinerja	Kriteria Penilaian Realisasi Kinerja	Kode
1	≥ 91	Sangat Tinggi	
2	76 ≤ 90	Tinggi	
3	66 ≤ 75	Sedang	
4	51 ≤ 65	Rendah	
5	≤ 50	Sangat Rendah	

Sumber: Permendagri Nomor 86 Tahun 2017

Pengukuran capaian perjanjian kinerja tahun 2021 menggambarkan target yang harus dipenuhi Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu, dan Tenaga Kerja dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 3.2.
CAPAIAN KINERJA TAHUN 2021

No	Sasaran Strategis	Indikator kinerja	TARGET Tahun 2021	Realisasi	%
I.	Meningkatnya Investasi	Nilai Investasi PMDN (rupiah)	62.256.215.500	67.442.916.200	108,33
		Nilai Investasi PMA (\$)	21.000.000	359.382	1,71 %
		Kenaikan/ penurunan realisasi PMDN	77,20%	137,32 %	177,88 %
II.	Meningkatnya daya saing dan produktivitas Tenaga Kerja:	Rasio daya serap tenaga kerja (%)	50,51 %	2,14 %	4,24 %
		Tenaga Kerja yang ditempatkan	2.250	72	3,20 %
III.	Meningkatnya perlindungan tenaga kerja	Jumlah Tenaga kerja yang dilindungi	69.858	28.288	40,49 %
IV.	Meningkatnya kualitas pelayanan publik	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	95,00 %	83,66 %	88,06 %

B. ANALISIS CAPAIAN KINERJA

Akuntabilitas Kinerja adalah Perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan/kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai tujuan–tujuan dan sasaran-sasaran yang telah ditetapkan melalui alat pertanggungjawaban secara periodik.

Laporan ini memberikan gambaran mengenai tingkat pencapaian sasaran strategis dengan membandingkan realisasi indikator kinerja sasaran strategis terhadap target yang telah ditetapkan.

Pada tahun 2021, pengukuran kinerja dilakukan terhadap 4 (Empat) Sasaran Strategis dengan menggunakan 6 (Enam) Indikator Kinerja yang ditetapkan dalam dokumen Perjanjian Kinerja Tahun 2021.

1. Sasaran strategis I

Tabel 3.3
Capaian Indikator Kinerja Sasaran ke-1

Sasaran 1	Meningkatnya Investasi					
Indikator Kinerja Sasaran	Tahun 2020			Tahun 2021		
	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian
Nilai Investasi PMDN (Rupiah)	56.605.136.000	28.418.800.000	50,21 %	62.256.215.500	67.442.916.200	108,33 %
Nilai Investasi PMA (\$)	10.500.000	7.487.000	71,30 %	21.000.000	359.382	1,71 %
Kenaikan/ penurunan realisasi PMDN			77,20 %	77,20 %	137,32 %	177,88 %

Berdasarkan 3 indikator kinerja sasaran yang merupakan indikator kinerja utama (IKU) DPMPTSPK Kabupaten Kepulauan Selayar pada Tahun 2021, indikator: (1) Nilai Investasi PMDN (Rupiah), (2) IKU Nilai Investasi PMA (\$), dan (3) Kenaikan/ penurunan realisasi PMDN. Tingkat ketercapaian Indikator Nilai Investasi PMDN (Rupiah) pada tahun 2021 sebesar 108,33% mengalami peningkatan dari tahun 2020 yang memiliki capaian sebesar 50,21 % melewati target capaian. Indikator Nilai Investasi PMA pada tahun 2021 sebesar 1,71% mengalami penurunan yang sangat signifikan dari tahun sebelumnya yaitu pada tahun 2020 sebesar 71,30 %. Hal ini menunjukkan pelaksanaan pencapaian indikator kinerja sangat dari tahun sebelumnya. Penyebab turunnya kinerja realisasi nilai Investasi Asing (PMA) adalah bencana pandemi Covid-19 yang menjadikan pembatasan social skala besar pada tahun 2021 sehingga aktivitas PMA menurun drastis. Indikator Nilai Kenaikan/ penurunan realisasi PMDN pada tahun 2021 mencapai 177,88% mengalami kenaikan di tahun sebelumnya di 2020 sebesar 77,20%.

Berdasarkan skala nilai peringkat kinerja pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 tahun 2010 menunjukkan bahwa indikator kinerja sasaran

strategis Nilai Investasi PMDN (Rupiah) menunjukkan pencapaian yang sangat tinggi, sasaran strategis Nilai Investasi PMA (\$) berada pada kategori sangat rendah, dan pada sasaran strategis Kenaikan/ penurunan realisasi PMDN berada pada kategori sangat tinggi.

Kenyataan yang menunjukkan rendahnya capaian kinerja pada tahun 2021 dipengaruhi oleh bencana Pandemi *Corona Virus* 2019 yang terjadi selama tahun 2021 yang menyebabkan Pembatasan Sosial Skala Besar (PSBB) sehingga pelaksanaan kegiatan promosi dan pelaksanaan Investasi terhambat.

Faktor yang paling mendukung adalah program pemerintah yang tengah mempersiapkan Kabupaten Kepulauan Selayar sebagai Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) bidang Kepariwisata.

Adapun permasalahan yang terjadi di Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu, dan Tenaga Kerja adalah:

- a. Belum tersebarnya investasi ke seluruh Sektor di Kabupaten Kepulauan Selayar.
- b. Sektor/lapangan usaha yang diminati investor untuk menanamkan usahanya berada pada sektor sekunder dan tersier, masih minim minat investor untuk menanamkan usahanya pada sektor primer misalnya di sektor pertanian dan perkebunan;
- c. Masih rendahnya kesadaran perusahaan untuk menyampaikan Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM), secara rutin;
- d. Penyelesaian permasalahan yang dihadapi perusahaan PMA/PMDN di Kabupaten Kepulauan Selayar masih belum optimal disebabkan ada beberapa permasalahan yang tidak dapat diselesaikan diantaranya disebabkan tidak adanya regulasi yang mewajibkan penyampaian (LKPM) yang bersifat memaksa.

Adapun solusi dari permasalahan yang terjadi di Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu, dan Tenaga Kerja adalah:

- a. Penyusunan dokumen profil peluang investasi sampai dengan tahap Feasibility Study (FS) dan diusahakan memakai konsultan yang sudah kredibel di mata investor luar negeri, sehingga profil peluang investasi tersebut sudah layak untuk dijual kepada investor, terutama investor dari luar negeri.
- b. Meningkatkan pelaksanaan pembinaan terhadap perusahaan PMA/PMDN tentang pentingnya menyampaikan laporan LKPM. Juga perlu diwacanakan adanya reward bagi perusahaan yang rutin menyampaikan LKPM setiap triwulan
- c. Lebih meningkatkan koordinasi pihak yang telibat dalam penyiapan investasi terutama dengan Instansi seperti Pajak, PLN, dan regulasi yang memaksa untuk menyampaikan (LKPM) karena permasalahan yang menyangkut hal itu susah untuk dicarikan solusinya.

2. Sasaran strategis II

Tabel 3.4
Capaian Indikator Kinerja Sasaran ke-2

Sasaran 2	Meningkatnya Daya Saing dan Produktivitas Tenaga Kerja					
Indikator Kinerja Sasaran	Tahun 2020			Tahun 2021		
	Target	Realisasi	Capaian (%)	Target	Realisasi	Capaian (%)
Rasio daya serap tenaga kerja (%)	40,76	35,22	86,40 %	50,51 %	2,14 %	4,24 %
Tenaga Kerja yang ditempatkan (orang)	1.750	292	16,68 %	2.250	72	3,20 %

Berdasarkan target yang ditetapkan dalam RPJMD bahwa target dari Rasio daya serap tenaga kerja pada tahun 2021 sebesar 50,51%. Pada tahun 2021 realisasi Rasio daya serap tenaga kerja sebesar 2,14% sehingga capaian kinerja pada tahun

2021 sebesar 4,24% berada pada kategori sangat rendah. Jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya 2020 realisasi rasio daya serap tenaga kerja mengalami penurunan yang sangat signifikan.

Sesuai target yang ditetapkan dalam RPJMD tahun 2021 bahwa target dari pencari kerja yang ditempatkan 2.250 orang memiliki nilai realisasi sebanyak 72 orang, memiliki nilai capaian indikator kinerja ini sebesar 3,20%, dengan kategori sangat rendah. Jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya 2020 realisasi jumlah pencari kerja yang ditempatkan mengalami penurunan yang sangat signifikan.

Berdasarkan hasil pendataan sejumlah perusahaan yang ada di Kabupaten Kepulauan Selayar yang membuka lowongan kerja tahun 2021 hanya 25 perusahaan. Kondisi ini jauh dari harapan karena banya perusahaan yang menerima karyawan tanpa pengumuman, hanya melalui karyawan yang bekerja pada perusahaan itu untuk mencari tenaga kerja yang dibutuhkan pimpinannya. Begitupun instansi pemerintah dalam membuka lowongan kerja tidak mempersyaratkan kartu pencari kerja, sehingga data lowongan pekerjaan perusahaan swasta maupun instansi pemerintah hanya bersumber dari perusahaan swasta yang membuka lowongan kerja melalui pengumuman dan melalui kunjungan perusahaan. Rasio daya serap tenaga kerja dan tenaga kerja yang ditempatkan tidak dapat memenuhi target disebabkan karena sejumlah pencari kerja yang telah diterima baik AKAL maupun AKAD, tidak melapor kembali ke Dinas dan susah nya para pencari kerja mendapatkan informasi lowongan pekerjaan terutama lowongan kerja antar lokal. Keuntungan bila masyarakat memiliki kesadaran untuk didata sebagai pencari kerja adalah adanya feedback dari Dinas PMPTSPTK sendiri manakala ada perusahaan yang membutuhkan tenaga kerja. Faktor yang paling berpengaruh adalah Bencana Pandemi *Corona Virus* 2019 yang terjadi sepanjang tahun meyebabkan kegiatan masyarakat terganggu.

3. Sasaran strategis III

Tabel 3.5
Capaian Indikator Kinerja Sasaran ke-3

Sasaran 3	Meningkatnya perlindungan tenaga kerja					
Indikator Kinerja Sasaran	Tahun 2020			Tahun 2021		
	Target	Realisasi	Capaian (%)	Target	Realisasi	Capaian (%)
Jumlah Tenaga Kerja yang dilindungi	56.992	25.837	45,34	69.858	28.288	40,49 %

Berdasarkan target RPJMD pada tahun 2021 pada sasaran Meningkatnya perlindungan tenaga kerja dengan indikator jumlah Lembaga ketenagakerjaan yang dilindungi dan dikembangkan sebesar 69.858 orang memiliki nilai realisasi kinerja sebesar 28.288 orang sehingga capaian kinerja sebesar 40,49% berada pada kategori rendah. Jika dibandingkan pada tahun 2020 realisasi kinerja mencapai 25.837 orang dengan target kinerja sebesar 56.992 orang sehingga capaian kinerjanya sebesar 45,34% berada pada kategori sangat rendah. Jika dilihat pada capaian kinerja tahun 2021 persentase capaiannya mengalami penurunan dari tahun sebelumnya, namun mengalami peningkatan jumlah realisasi dari tahun sebelumnya.

Rendahnya persentase capaian kinerja Jumlah Tenaga kerja yang dilindungi disebabkan oleh capaian target ditahun 2021 meningkat dan peserta program jaminan sosial ketenagakerjaan telah mengklaim dengan rincian berikut:

No	Jenis Klaim	Sektor Formal	Sektor Informal	Sektor Jasa Konstruksi
1	Jaminan Hari Tua	1.621	-	-
2	Jaminan Kecelakaan Kerja	12	5	-
3	Jaminan Kematian	28	1	-
4	Jaminan Kematian	76	-	-
Jumlah		1.737	6	
Total		1.743 Orang		

Terdapat 1.743 orang telah mengklaim jaminan sosial ketenagakerjaan pada tahun 2021 sehingga peserta program jaminan sosial ketenagakerjaan berkurang.

Faktor kesadaran dari para kerja itu sendiri untuk memiliki jaminan sosial ketenagakerjaan/BPJS ketegakerjaan sehingga berpotensi terjadi konflik antara pengusaha dan pekerja/karyawan jika terjadi kecelakaan kerja. Adapun solusi permasalahan ketenagakerjaan telah dilakukan dengan menciptakan proram inovasi berikut:

1. **Simpelnaker (Sistem Informasi Perlindungan Tenaga kerja)**

Kemudahan dalam memberikan perlindungan tenaga kerja dan mewujudkan kesejahteraan pekerja melalui peningkatan dan perluasan pelayanan informasi dan pengaduan serta perlindungan tenaga kerja baik formal maupun informal);

2. **Agen Jalinaker (Jaring perlindungan tenaga kerja);**

Melibatkan BUMDes dan Pelaku UMKM yang berada di Kecamatan dan Desa sebagai bagian dari Agen Jalinaker;

3. **Menerapkan Program Inovasi G-SMS (Gerakan Satu Menanggung Satu)**

Gerakan Satu ASN Menaggung Satu Pekerja Bukan Penerima Upah dengan semangat “Assikamaseang” (saling menyayangi)

Program tersebut diharapkan berdampak signifikan terhadap peningkatan jumlah pekerja yang terdaftar dalam BPJS ketenagakerjaan sehingga terjadi peningkatan pada tahun berikutnya.

4. **Sasaran strategis IV**

Tabel 3.6
Capaian Indikator Kinerja Sasaran ke-4

Sasaran 4	Meningkatnya kualitas pelayanan publik					
Indikator Kinerja Sasaran	Tahun 2020			Tahun 2021		
	Target	Realisasi	Capaian (%)	Target	Realisasi	Capaian (%)
Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	95,00 %	81,67 %	85,97 %	95,00 %	83,66 %	88,06 %

Upaya meningkatkan kualitas pelayanan publik terhadap penerima layanan pada tahun 2021 memiliki Nilai Realisasi 83,66 % dari 95% target kinerja sehingga persentase capaian kinerja sebesar 88,66 %. Capai kinerja tahun 2021 mengalami peningkatan dari tahun sebelumnya yakni Tahun 2020 Indeks Kepuasan Masyarakat dengan target yaitu 95,00% realisasinya mencapai 81,67 % sehingga capaiannya 85,97%. Dapat dipahami peningkatan Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) dari Tahun 2020 ke tahun 2021 mengalami peningkatan dalam kategori sangat tinggi.

Faktor yang menyebabkan nilai realisasi Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) mengalami peningkatan meskipun dalam kondisi Pandemi *Corona Virus* 2019 adalah dengan terbentuknya Mal Pelayanan Publik (MPP) yang diresmikan oleh Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi. Hal tersebut menjadikan pelayanan yang lebih baik, transparan, dan akuntabel meminimalisir terjadinya pungli.

Berdasarkan pengukuran kinerja yang telah dilakukan terhadap capaian indikator kinerja DPMPTSP TK tahun 2021, diperoleh informasi bahwa capaian kinerja DPMPTSP TK tahun 2021 berhasil mencapai target yang telah ditetapkan, dengan capaian indikator kinerja melebihi target yang telah ditetapkan. Akan tetapi, walaupun melampaui target yang telah ditetapkan, terdapat indikator kinerja yang capaiannya turun dari tahun sebelumnya.

Adapun faktor-faktor yang menyebabkan keberhasilan atau peningkatan dan penurunan kinerja DPMPTSP tahun 2020 adalah:

- a. Adanya Komitmen pimpinan dan aparatur DPMPTSP TK dalam mencapai target kinerja peningkatan investasi;
- b. Kondusifnya iklim investasi di Kabupaten Kepulauan Selayar;
- c. Adanya jaminan kepastian hukum pelaksanaan penanaman modal di Kabupaten Kepulauan Selayar;

- d. Adanya kesadaran para pelaku usaha dalam menyampaikan LKPM;
- e. Promosi potensi dan peluang investasi yang dilaksanakan secara intensif melalui berbagai media;
- f. Berjalanya pelaksanaan pemantauan, pembinaan dan pengawasan.

C. Realisasi Keuangan

Realisasi sasaran yang ditetapkan dapat diartikan sebagai perwujudan suatu instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan melalui alat pertanggungjawaban secara periodik.

Laporan tersebut memberikan gambaran penilaian tingkat pencapaian target kegiatan dari masing-masing kelompok indikator kinerja kegiatan dan penilaian tingkat pencapaian target sasaran masing-masing indikator kinerja sasaran yang ditetapkan dalam dokumen Renstra Tahun 2016-2021 maupun Rencana Kerja Tahunan 2021.

Sesuai ketentuan tersebut, pengukuran kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, sasaran yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan misi dan visi instansi pemerintah.

Target yang akan dicapai dalam pelaksanaan program dan kegiatan tahun 2021 meliputi 10 (Sebelas) program dan 20 (Dua Puluh) kegiatan.

1. Target kinerja sasaran program dan kegiatan sebagai berikut :

Tabel 3.8
Target kinerja sasaran program, kegiatan, dan subkegiatan

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Uraian Program/ Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator	Target	REALISASI	Persentase Capaian Kinerja Keuangan	Permasalahan	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
1	2	3	5	6	7	8	9	10	11
1	Meningkatnya tertib administrasi pengelolaan keuangan dan asset daerah	Laporan Keuangan OPD sesuai SAP	1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Capaian Kinerja (%)	50,91%				
				Persentase Capaian Kinerja Keuangan (%)	79,35%	97,85%			
					Rp. 6.843.277.000 ,-	Rp. 6.562.561.398,-	95,90		
		Laporan Kinerja Sesuai metode SILAJARA	a. Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Ketersediaan Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	100%	96,83			
					49.158.000,-	475.98.230,-	96,83		
			1) Penyusunan Dokumen Perencanaan perangkat daerah	Jumlah Dokumen Renja dan Perubahan Renja yang disusun dan ditetapkan, jumlah Dokumen Renstra PD yang disusun dan ditetapkan	2 Dok	2 Dok			
					4.351.000,-	3.990.000,-	91,67		
			2) Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA SKPD	Jumlah Dokumen RKA pokok yang tersusun	1 Dok	1 Dok			
					3.160.000,-	3.160.000,-	100		
			3) Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA perubahan SKPD	Jumlah Dokumen RKA perubahan yang tersusun	1 Dok	1 Dok			
					3.820.000,-	3.819.000,-	100		
			4) Koordinasi dan Penyusunan Dokumen DPA SKPD	Jumlah Dokumen DPA pokok yang tersusun	1 Dok	1 Dok			
					3.820.000	3.819.000,-	100		
			5) Koordinasi dan Penyusunan Dokumen DPA perubahan SKPD	Jumlah Dokumen DPA perubahan yang tersusun	1 Dok	1 Dok			
					3.820.000	3.819.760-	100		
			6) Koordinasi dan Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Jumlah Dokumen Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD yang tersusun dan dilaporkan	1 Dok	1 Dok			
					24.317.000	24.063.700,-	98,96		
			7) Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen evaluasi kinerja (LAKIP, LPPD, LKPJ, RKPD SKPD) perangkat	4 Dok	4 Dok			
					5.000.000	4.926.770,-	98,60		

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Uraian Program/ Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator	Target	REALISASI	Persentase Capaian Kinerja Keuangan	Permasalahan	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
1	2	3	5	6	7	8	9	10	11
				daerah yang tersusun dan dilaporkan					
			b. Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah laporan keuangan yang akuntabel yang disusun	1 Dok	1 Dok			
					4.351.866.000,-	4.139.986.824,-	95,13		
			1) Penyediaan gaji dan tunjangan ASN	Jumlah ASN yang menerima gaji dan tunjangan	46	46			
					4.351.866.000,-	4.133.487.824,-	95,16		
			2) Koordinasi dan Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Tersedianya laporan keuangan akhir tahun	1 Dok	1 Dok			
					3.000.000,-	2.999.760,-	100		
			3) Koordinasi dan Penyusunan laporan keuangan bulanan/ semesteran SKPD	Jumlah laporan keuangan bulanan/ semesteran yang tersedia	14 Dok	14 Dok			
					3.500.000,-	3.499.240,-	100		
			c. Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah Pada Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan administrasi umum Perangkat Daerah	100%	100%			
					12.649.000,-	12.638.180,-	99,91		
			1) Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Barang milik Daerah SKPD yang disusun dan dilaporkan	2 Dok	2 Dok			
					5.000.000,-	4.999.800,-	100		
			2) Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	Jumlah laporan barang milik daerah yang disusun dan dilaporkan	2 Dok	2 Dok			
					4.500.000,-	4.489.480,-	99,76		
			3) Penatausahaan Barang Milik Daerah Pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan barang milik daerah yang disusun dan dilaporkan	2 Dok	2 Dok			
					3.149.000,-	3.148.900,-	100		
			d. Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan administrasi kepegawaian	100%	100%			
					38.500.000,-	37.945.000	100		
			1) Pendidikan dan pelatihan pegawai berdasarkan tugas dan fungsi	Jumlah pegawai yang mengikuti pendidikan dan pelatihan berdasarkan tugas dan fungsi	1 Pegawai	1 Pegawai			
					10.000.000,-	10.000.000,-	100		
			2) Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan	Jumlah sosialisasi peraturan perundang-undangan yang dilaksanakan	Pegawai	Pegawai			

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Uraian Program/ Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator	Target	REALISASI	Persentase Capaian Kinerja Keuangan	Permasalahan	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
1	2	3	5	6	7	8	9	10	11
			3) Bimbingan Teknis implementasi Peraturan Perundang-undangan	Jumlah pegawai yang mengikuti bimtek implementasi peraturan perundang- undangan	20 orang	20 orang			
					28.500.000,-	27.945.000,-	97,93		
			e. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan administrasi umum Perangkat Daerah	100%	100%			
					Rp. 386.748.300,-	386.347.873	99,89		
			1) Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Jumlah barang Cetak dan Penggandaan yang tersedia	2 Jenis	2 Jenis			
					22.627.300,-	22.523.740,-	100		
			2) Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Jumlah bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang tersedia	Jenis	Jenis			
					15.000.000,-	15.000.000,-	100		
			3) Penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	Jumlah rapat koordinasi dan konsultasi SKPD yang terselenggara	418 SPD	418 SPD			
					349.121.000,-	348.824.133,-	100		
			f. Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase pemenuhan sarana prasarana perkantoran yang tersedia	100%	100%			
					528.568.100,-	482.047.498,-	91,19		
			1) Pengadaan kendaraan dinas operasional atau lapangan	Jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang tersedia	2 Unit	2 Unit			
					50.000.000,-	48.135.998,-	96,00		
			2) Pengadaan mebel	Jumlah peralatan mobiler yang tersdia	48 Unit	48 Unit			
					124.975.000,-	124.475.000,-	99,21		
			3) Pengadaan peralatan dan mesin lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin yang tersedia	96 Unit	96 Unit			
					353.593.100,-	309.436.500,-	87,54		
			g. Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemenuhan administrasi perkantoran	100%	100%			
					868.924.600,-	866.614.541,-	99,73		
			1) Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Jumlah layanan telepon, listrik, dan air yang tersedia	3 Jenis layanan	3 Jenis layanan			
					104.684.000,-	103.623.896,-	99,43		
			2) Penyediaan jasa pelayanan umum kantor	Jumlah Layanan umum Kantor yang tersedia	3 Jenis layanan	3 Jenis layanan			
					764.240.600,-	762.990.645,-	99,84		
			h. Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah barang milik daerah yang dipelihara	32 Unit				
					600.433.000,-	588.581.212,-	98,02		

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Uraian Program/ Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator	Target	REALISASI	Persentase Capaian Kinerja Keuangan	Permasalahan	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
1	2	3	5	6	7	8	9	10	11
			1) Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan, dan pajak kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan	Jumlah kendaraan perorangan Dinas atau kendaraan dinas jabatan yang terpelihara	9 Jenis	9 Jenis			
					75.438.000,-	73.759.512,-	97,80		
			2) Pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya	Jumlah Peralatan dan mesin yang terpelihara	5 Jenis	5 Jenis			
					52.100.000,-	49.931.000,-	95,94		
			3) Pemeliharaan/rehabilitasi gedung kantor dan bangunan lainnya	Jumlah sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang terpelihara	3 Unit	3 Unit		Minat Investor masih rendah disebabkan RTRW belum ada hasil revisi	
					472.895.000,-	464.890.700,-	98,15		
2	Meningkatnya Investasi	Nilai Investasi PMDN (Rp Juta)	Program Promosi Penanaman Modal	Jumlah Investor PMDN/PMA	10 Investor	20 Investor			
					Rp. 226.339.000,-	174.916.550	77,28		
		Nilai Investasi PMA (\$ Juta)	Kegiatan Penyelenggaraan promosi penanaman modal yang menjadi kewenangan daerah kabupaten/ kota	Jumlah kegiatan Penerimaan Misi penanaman modal	5 kali	5 kali			
					Rp.226.339.000 ,-	174.916.550	77,28		
		Nilai Investasi PMA (\$ Juta)	1) Penyusunan Strategi Promosi Penanaman Modal	Jumlah dokumen strategi promosi penanaman modal yang tersusun	1 Dok	1 Dok			
					50.000.000,-	46.924.800,-	93,86		
			2) Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Kegiatan seminar bisnis, forum, one on one meeting yang dilaksanakan	0	2 kali			
				Kegiatan pameran penanaman modal	1 Kali	1 Kali			
					156.339.000,-	127.991.750,-	82,93		
			Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal	Jumlah Nilai Realisasi Investasi (PMDN/PMA) (Rp. Juta Rupiah)	39.200				
					322.573.000,-	281.169.100	87,16		
			Kegiatan Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah Nilai Realisasi Investasi (PMDN/PMA) (Rp. Juta Rupiah)	Rp. 39.200	Rp. 72.474			
					322.573.000,-	281.169.100	87,16		
			1) Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan Pelaksanaan Penanaman Modal	Jumlah perusahaan PMDN/PMA yang terpantau	100 Pelaku usaha	127 Pelaku usaha			
					45.600.000,-	37.663.000,-	82,66		
			2) Koordinasi dan Sinkronisasi Pembinaan Pelaksanaan Penanaman Modal	Jumlah Perusahaan PMDN/PMA yang terfasilitasi	182 Pelaku usaha	182 Pelaku usaha			
					185.773.000,-	171.466.100,-	92,33		
			3) Koordinasi dan Sinkronisasi	Jumlah Perusahaan	50 Pelaku usaha	63 Pelaku usaha			

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Uraian Program/ Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator	Target	REALISASI	Persentase Capaian Kinerja Keuangan	Permasalahan	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
1	2	3	5	6	7	8	9	10	11
			Pengawasan Pelaksanaan Penanaman Modal	PMDN/PMA yang diawasi	91.200.000,-	72.040.000,-	78,88		
			Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal	Persentase Potensi untuk peluang Investasi daerah (%)	0	0,-		Belum ada investor yang mengajukan kemudahan dalam berinvestasi	
			Kegiatan Penetapan Pemberian Fasilitas/ insentif di bidang penanaman modal yang menjadi kewenangan daerah kab/ kota	Jumlah Perusahaan yang Mendapatkan Pemberian Fasilitas/ Insentif Dibidang Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah		0,-			
			1) Penetapan Kebijakan Daerah mengenai Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal	Jumlah Perusahaan yang Mendapatkan Pemberian Fasilitas/ Insentif Dibidang Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah		0,-			
			2) Evaluasi Pelaksanaan Pemberian fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal	Jumlah laporan evaluasi pelaksanaan pemberian fasilitas/insentif yang tersedia		0,-			
			Program Pelayanan Penanaman Modal	Persentase Izin yang diterbitkan (%)	100%	100%,-			
			Kegiatan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan secara Terpadu Satu Pintu di Bidang Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Penerbitan izin perizinan dan non perizinan	2123 Izin	1.153 Izin		Untuk penerbitan NIB, Izin lokasi tidak lagi dipersyaratkan bagi pemodal di bawah 5 M	Menurunkan target kinerja penerbitan izin
					Rp.104.560.000 ,-	104.553.500,-	99,99		
			1) Penyediaan Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	Jumlah izin yang terbit	2123 Izin	1.153 Izin		Untuk penerbitan NIB, Izin lokasi tidak lagi dipersyaratkan bagi pemodal di	Menurunkan target kinerja penerbitan izin
					54.560.000,-	54.553.500,-	99,98		

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Uraian Program/ Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator	Target	REALISASI	Persentase Capaian Kinerja Keuangan	Permasalahan	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
1	2	3	5	6	7	8	9	10	11
								bawah 5 M	
			2) Pemantauan Pemenuhan Komitmen Perizinan dan Non Perizinan Penanaman Modal	Jumlah Dokumen Kegiatan pemantauan Komitmen Perizinan Penanaman Modal yang tersedia	1 Dokumen (300 Izin) 35.000.000,-	1 Dokumen (1014 Izin) 35.000.000,-	100		
			3) Penyediaan layanan konsultasi dan pengelolaan pengaduan masyarakat terhadap pelayanan terpadu perizinan dan non perizinan	Jumlah Dokumen Kegiatan Konsultasi perizinan dan non perizinan penanaman modal yang tersedia	1 Dokumen 15.000.000,-	1 Dokumen 15.000.000,-	100		
			Program Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal	Persentase pemenuhan permintaan data dan informasi yang diterima secara online dan terintegrasi (%)	100% 12.000.000,-	100% 9.996.814,-	83,67		
			Kegiatan Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase pemenuhan permintaan data dan informasi yang diterima	100% 12.000.000,-	100% 9.996.814,-	83,67		
			Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegarsi secara Elektronik	Jumlah laporan berupa data dan informasi perizinan dan non perizinan provinsi kab/kota	14 Laporan 12.000.000,-	14 Laporan 9.996.814,-	83,67		
3	Meningkatnya daya saing dan produktivitas Tenaga Kerja :	Rasio Daya Serap Tenaga Kerja	Program Perencana Tenaga Kerja, dengan pagu Anggaran	Persentase kegiatan yang mengacu pada RTK (%)	50% Rp. 15.800.000,-	0 15.530.000,-	85,89	Belum ada perusahaan yang Menyusun dokumen RTK	Mendorong perusahaan Menyusun RTK bila dibutuhkan membuat regulasi yang mewajibkan penyusunan RTK Bagi perusahaan
			Kegiatan Penyusunan Rencana Tenaga Kerja	Jumlah kegiatan yang mengacu pada RTK	2 Dok 15.800.000,-	15.530.000,-	85,89		
			Penyusunan rencana tenaga kerja makro	Dokumen perencanaan tenaga kerja Makro kab/kota yang tersedia	1 Dok	1 Dok			
				Persentase akurasi proyeksi indikator dalam rencana tenaga kerja.	100%	100%			
					15.800.000,-	15.530.000,-	85,89		
		Tenaga Kerja yang	Program Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja	Persentase Tenaga Kerja yang Bersertifikat Kompetensi (%)	0,40%	0			

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Uraian Program/ Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator	Target	REALISASI	Persentase Capaian Kinerja Keuangan	Permasalahan	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
1	2	3	5	6	7	8	9	10	11
		ditempatkan		Tingkat Produktivitas Tenaga Kerja		31.616,892			
					Rp. 496.803.000,-	491.570.750,-	98,95		
			Kegiatan Pelaksanaan Pelatihan Berdasarkan Unit Kompetensi	Jumlah pelatihan yang terlaksana dan bersertifikat kompetensi	17 paket Pelatihan	20 paket Pelatihan			
					450.895.000,-	448.254.050,	99,41		
			1) Proses pelaksanaan pendidikan dan pelatihan keterampilan bagi pencari kerja berdasarkan klaster kompetensi	Jumlah penerapan program PBK dengan kualifikasi klaster					
				Jumlah lulusan bersertifikat pelatihan	276 orang	276 orang			
				Jumlah Lulusan bersertifikat kompetensi					
				Jumlah Calon Pekerja Migran Indonesia		9 orang			
				Jumlah Calon Pekerja Migran Indonesia (CPMI)/Calon Tenaga Kerja Indonesia (CTKI)					
				Jumlah Penganggur yang dilatih	324 orang	324 orang			
					85.446.000,-	85.397.200,-	99,93		
			2) Koordinasi Lintas lembaga dan Kerja sama dengan Sektor Swasta untuk Penyediaan Instruktur serta Sarana dan Prasarana Lembaga Pelatihan Kerja	Jumlah kelompok Alumni BLK yang memperoleh Bantuan Peralatan	11 Kelompok (54 orang)	11 Kelompok (54 orang)			
				Persentase LPK yang terakreditasi	0	0			
				Persentase Instruktur bersertifikat kompetensi	6 orang	6 orang		Minimnya pegawai yang memiliki sertifikat kompetensi instruktur	Mendorong pegawai mengikuti diklat instruktur
				Rasio Jumlah instruktur terhadap peserta pelatihan	54	54			
				Persentase LPK yang memiliki perizinan		2 LPK			
					365.449.000,-	362.856.850,-	98,48		
			Kegiatan Pengukuran produktivitas tingkat daerah kab/kota	Jumlah perusahaan yang diukur produktivitas tenaga kerja	2 Perusahaan	2 Perusahaan		Keterbatasan SDM yang berkompeten dalam melaksanakan	Melaksanakan perencanaan kegiatan yang matang sehingga
					45.908.000,-	43.316.700,-			
			Pengukuran Kompetensi dan Produktivitas Tenaga Kerja	Jumlah Data tingkat produktivitas total yang	2 perusahaan	2 perusahaan		91,56	
					45.908.000,-	43.316.700,-			

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Uraian Program/ Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator	Target	REALISASI	Persentase Capaian Kinerja Keuangan	Permasalahan	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
1	2	3	5	6	7	8	9	10	11
				tersedia				pengukuran kompetensi dan produktivitas tenaga kerja	
			Program Penempatan Tenaga Kerja,	Persentase tenaga kerja yang ditempatkan	2250	72		perusahaan yang menerima karyawan tanpa pengumuman, hanya melalui karyawan yang bekerja pada perusahaan itu untuk mencari tenaga kerja yang dibutuhkan pimpinannya	Inovasi pencatatan AK.1 (Kartu kuning) sehingga data tenaga kerja lebih optimal
					11.648.000,-	11.606.000,-	99,64		
			Kegiatan Pelayanan Antarakerja di Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah tenaga kerja yang mendapat pelayanan antarkerja	20 orang				
					11.648.000,-	11.606.000,-	99,64		
			Penyelenggaraan Unit Layanan Disabilitas Ketenagakerjaan	Jumlah Penyelenggaraan Unit Layanan Disabilitas Ketenagakerjaan	2 layanan	2 layanan			
					11.648.000,-	11.606.000,-	99,64		
			Kegiatan Pengelolaan Informasi Pasar Kerja	Jumlah pencari kerja melalui aplikasi informasi kerja	0	0			
4	Meningkatnya perlindungan tenaga kerja	Jumlah tenaga kerja yang dilindungi	Program Hubungan Industrial	Persentase Perusahaan yang menerapkan tata kelola perusahaan yang layak	0,30%	0		Belum ada perusahaan yang ingi menerapkan tata kerja yang layak	Dibutuhkan regulasi yang mewajibkan penerapan tata kerja yang layak bagi perusahaan
					79.547.000,-	68.433.000,-	86,03		
			Kegiatan Pengesahan peraturan perusahaan dan pendaftaran perjanjian kerja bersama untuk yang memepunyai wilayahbkerja lebih dari 1(satu) Kab/Kota	Jumlah perusahaan yang memiliki Peraturan Perusahaan	5 Perusahaan	0			
					61.677.000,-	50.957.000,-	82,03		
			1) Pengesahan Peraturan Perusahaan bagi Perusahaan	Jumlah perusahaan yang telah memiliki Peraturan Perusahaan (PP)	0 (20 Perusahaan)	0 (20 Perusahaan)			
				Jumlah perusahaan yang telah memiliki Perjanjian Kerja Bersama (PKB)					
				Jumlah perusahaan yang sudah menyusun					

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Uraian Program/ Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator	Target	REALISASI	Persentase Capaian Kinerja Keuangan	Permasalahan	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
1	2	3	5	6	7	8	9	10	11
				Jumlah perjanjian kerja yang disahkan oleh dinas bidang ketenagakerjaan kab/kota	5 27.900.000,-	0 27.900.000,-	100		
				Jumlah tenaga kerja yang telah terdaftar sebagai peserta BPJS Ketenagakerjaan	69.858 Pekerja	28.288 pekerja			
			2) Penyelenggaraan Pendataan dan Informasi Sarana Hubungan Industrial dan Jamsostek serta Pengupahan	Jumlah tenaga kerja khusus terdaftar dalam satu kab/kota					
					33.777.000,-	22.697.000,-	67,20		
			Kegiatan Pencegahan dan penyelesaian perselisihan hubungan industrial, mogok kerja dan penutupan perusahaan yang berakibat/ berdampak pada ekepntingan di 1 (satu) daerah provinsi	Jumlah bimbingan teknis/sosialisasi/FGD tata cara pencegahan dan penyelesaian perselisihan hubungan industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang terlaksana	1 kali	1 kali			
					17.870.000,-	17.836.000,-	99,81		
			Pencegahan Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di Satu Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah bimbingan teknis/sosialisasi/FGD tata cara pencegahan dan penyelesaian perselisihan hubungan industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang terlaksana	1 kali	1 kali			
				Jumlah perselisihan hubungan industrial	Sosialisasi 20 perusahaan	Sosialisasi 20 perusahaan			
					17.870.000,-	17.836.000,-	99,81		

Untuk melaksanakan Kegiatan-kegiatan tersebut di atas telah ditetapkan anggaran tahun 2021 sebagai berikut :

- a. Pendapatan ditetapkan sebesar Rp. 313.650.000,- (sebelum Perubahan) dan setelah Anggaran Perubahan sebesar Rp. 313.650.000,-
- b. Belanja Tidak Langsung ditetapkan sebesar Rp. 425.720.000,- (sebelum Perubahan) dan setelah Anggaran Perubahan sebesar Rp. 528.568.100,-
- c. Belanja Langsung ditetapkan sebesar Rp. 4.780.022.425,- dan setelah Anggaran Perubahan sebesar Rp. 2.781.431.258,-

Tabel 3.9
Anggaran 2021

No	URAIAN	ANGGARAN 2021		REALISASI	%
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN		
1	2	3	4	5	6
1	PENDAPATAN	Rp. 313.650.000,-	Rp. 313.650.000,-	Rp. 119.962.500,-	39,00
2	BELANJA	Rp. 8.287.442.000,-	Rp. 8.092.547.000,-	Rp 7.731.337.112,-	95,54
	A. BELANJA TIDAK LANGSUNG	Rp. 425.720.000,-	Rp. 528.568.100,-	Rp 482.047.498,-	91,20
	BELANJA MODAL PERALATAN DAN MESIN	Rp. 425.720.000,-	Rp. 528.568.100,-	Rp 482.047.498,-	91,20
	B. BELANJA LANGSUNG	Rp. 4.780.022.425,-	Rp. 2.781.431.258,-	Rp 2.611.020.270,-	93,87
	BELANJA PEGAWAI	Rp. 4.459.520.000,-	Rp. 4.351.886.000,-	Rp 4.133.487.824,-	94,98
	BELANJA BARANG DAN JASA	Rp. 3.074.691750,-	Rp. 2.884.582.650,-	, Rp 2.790.787.690,-	96,75
	BELANJA HIBAH	Rp. 327.510.250,-	Rp. 327.510.250,-	Rp 325.014100,-	99,60
	SURPLUS/ (DEVISIT)	Rp. 7.973.792.000,-	Rp. 7.778.897.000,-	Rp 7.611.374.612,-	97,85

2. Target kinerja sasaran program dan kegiatan Pendapatan/Penerimaan Retribusi.

Pada Tahun 2021 ditargetkan pendapatan dianggarkan sebesar Rp. 313.650.000,- dan teralisasi sebesar Rp. 119.962.500,- atau 39%. Rendahnya realisasi retribusi perizinan tertentu Izin Mendirikan Bangunan disebabkan oleh kondisi pademi Covid-19 yang membatasi kegiatan masyarakat sehingga aktivitas pembangunan berkurang.

Tabel 3.10
Penerimaan Retribusi 2021

No	Jenis Retribusi Perizinan Tertentu	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	Persentase (%)
1	IMB	313.650.000,-	119.962.500,-	39 %
JUMLAH		313.650.000,-	119.962.500,-	39 %

3. Kinerja pelayanan perizinan dan non perizinan

Dalam Tahun 2020 telah terbit perizinan dan non Perizinan sebagai berikut :

Tabel 3.11
Penerbitan Perizinan dan Non Perizinan 2021

NO	JENIS PERIZINAN	JUMLAH IZIN		KET.
		IZIN	SUMBER DATA	
I. PENERBITAN IZIN MELALUI OSS 1.1 DAN SICANTIK CLOUD				
A. LAYANAN PERIZINAN				
BIDANG PENDIDIKAN				
1	IZIN PENDIDIKAN DASAR	-	-	-
2	IZIN PENDIDIKAN ANAK USIA DINIDAN PENDIDIKAN NON FORMAL	2	SICANTIK CLOUD	-
3	IZIN KETERANGAN PENELITIAN	135	SICANTIK CLOUD	
BIDANG KESEHATAN				
1	IZIN USAHA MIKRO OBAT TRADISONAL (UMOT)	-	-	-
2	IZIN PRT ALAT KESEHATAN DAN PKRT	-	-	
3	SERTIFIKAT PRODUKSI PANGAN INDUSTRI RUMAH TANGGA	-	-	-
4	IZIN TOKO ALAT KESEHATAN	-	-	
5	IZIN OPERASIONAL KLINIK	-	-	-
6	IZIN APOTEK / IZIN TOKO OBAT	-	-	-
7	IZIN MENDIRIKAN RUMAH SAKIT KELAS C, KELAS D, DAN KELAS D PRATAMA	1	SICANTIK CLOUD	-
8	IZIN OPERASIONAL RUMAH SAKIT KELAS C, KELAS D, DAN KELAS D PRATAMA	1	SICANTIK CLOUD	-
9	IZIN OPERASIONAL LABORATORIUM KLINIK UMUM PRATAMA	-	-	-
10	IZIN OPERASIONAL PUSKESMAS	1	SICANTIK CLOUD	
11	IZIN PENYELENGGARAAN PENGENDALIAN VEKTOR DAN BINTANG PEMBAWA PENYAKIT	-	-	-

NO	JENIS PERIZINAN	JUMLAH IZIN		KET.
		IZIN	SUMBER DATA	
12	IZIN PRAKTIK DAN IZIN KERJA TENAGA KESEHATAN	288	SICANTIK CLOUD	-
13	IZIN OPTIKAL			-
14	IZIN TERDAFTAR PENYEHAT TRADISIONAL	1	SICANTIK CLOUD	
15	IZIN PANTI SEHAT	-	-	-
BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG				
1	IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN (IMB)	94	SICANTIK CLOUD	-
2	SERTIFIKAT LAIK FUNGSI (SLF) BANGUNAN GEDUNG	-	-	-
3	IZIN USAHA JASA KONSTRUKSI	12	OSS	-
BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PEMUKIMAN				
1	IZIN PEMBANGUNAN DAN PENGEMBANGAN PERUSAHAAN	-	-	-
2	SERTIFIKAT KEPEMILIKAN GEDUNG	-	-	-
3	IZIN PEMBANGUNAN DAN PENGEMBANGAN KAWASAN PERMUKIMAN	-	-	-
4	KETERANGAN RENCANA KOTA (KRK)	43	SICANTIK CLOUD	-
BIDANG SOSIAL				
1	IZIN PENGUMPULAN SUMBANGAN	-	-	-
BIDANG TENAGA KERJA				
1	IZIN PEDAFTARAN LEMBAGA PELATIHAN KERJA	-	-	-
2	IZIN LEMBAGA PENEMPATAN TENAGA KERJA SWASTA (LPTKS)	-	-	-
3	IZIN MENGGUNAKAN TENAGA KERJA ASING DI LOKASI KERJA	-	-	-
4	KARTU TANDA PENCARI KERJA (AK/I)	-	-	-
BIDANG PERTANAHAN				
1	IZIN LOKASI	-	-	-
2	IZIN MEMBUKA TANAH NEGARA	-	-	-
BIDANG LINGKUNGAN HIDUP				
1	IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP	-	-	-
2	IZIN LINGKUNGAN	-	-	-
3	IZIN PENDAURULANGAN SAMPAH / PENGOLAHAN SAMPAH, PENGANGKUTAN SAMPAH YANG DISELENGGARAKAN OLEH SWASTA	-	-	-
BIDANG PERHUBUNGAN				
1	IZIN PENYELENGGARA ANGKUTAN ORANG DALAM TRAYEK	2	OSS	-

NO	JENIS PERIZINAN	JUMLAH IZIN		KET.
		IZIN	SUMBER DATA	
2	SPM ANGKUTAN PENYEBRANGAN	1	OSS	
3	SURAT PERSETUJUAN PENGOPRASIAN KAPAL ANGKUTAN PENYEBERANGAN	1	SICANTIK CLOUD	
4	IZIN PENYELENGGARA ANGKUTAN ORANG TIDAK DALAM TRAYEK	-	-	-
5	IZIN PENYELENGGARA ANGKUTAN BARANG	-	-	-
BIDANG KEBUDAYAAN				
1	IZIN MEMBAWA CAGAR BUDAYA KELUAR DAERAH KABUPATEN / KOTA DALAM 1 (SATU) DAERAH PROVINSI	-	-	-
BIDANG KEARSIPAN				
1	IZIN PENGGUNAAN ARSIP YANG BERSIFAT TERTUTUP YANG DISIMPAN DI LEMBAGA KEARSIPANDAERAH KABUPATEN / KOTA	-	-	-
BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN				
1	IZIN USAHA PERIKANAN (IUP) DI BIDANG PEMBUDIDAYAAN IKAN YANG USAHANYA DALAM 1 (SATU) DAERAH KABUPATEN / KOTA	1	OSS	-
2	TANDA PENCATATAN USAHA PEMBUDIDAYAAN IKAN (TPUPI)	-	-	-
3	TANDA PENCATATAN KAPAL PENGANGKUT IKAN (TPKPI)	-	-	
4	SURAT IZIN USAHA PERIKANAN (SIUP)	2	OSS	-
BIDANG PARIWISATA				
1	IZIN USAHA JASA PENYEDIA WISATA ALAM (IUPJWA)	2	OSS	-
2	TANDA DAFTAR USAHA PARIWISATA (TDUP)	6	OSS	-
BIDANG PERTANIAN				
1	TANDA DAFTAR USAHA PERKEBUNAN YANG KEGIATAN USAHANYA DALAM DAERAH KABUPATEN / KOTA	1	OSS	-
2	IZIN USAHA PRODUKSI BENIH / BIBIT TERNAK DAN PAKAN, FASILITAS PEMELIHARAAN HEWAN, RUMAH SAKIT HEWAN / PASAR HEWAN, RUMAH POTONG HEWAN	-	-	-
3	IZIN USAHA PENGE CER (TOKO, RETAIL, SUB DISTRIBUTOR) OBAT HEWAN	-	-	-
4	IZIN USAHA PETERNAKAN	4	OSS	-
5	IZIN USAHA PERKEBUNAN	1	OSS	-
6	IZIN PENGELUARAN TERNAK	25	SICANTIK	-

NO	JENIS PERIZINAN	JUMLAH IZIN		KET.
		IZIN	SUMBER DATA	
			CLOUD	
BIDANG PERDAGANGAN				
1	IZIN PENGELOLAAN PASAR RAKYAT, PUSAT PERBELANJAAN			-
2	IZIN USAHA TOKO SWALAYAN			-
3	TANDA DAFTAR GUDANG (TDG)	2	OSS	-
4	SURAT KETERANGAN PENYIMPANAN BARANG (SKPB)			-
5	IZIN USAHA MIKRO KECIL	90	OSS	-
6	IZIN USAHA PERDAGANGAN MINUMAN BERALKOHOL GOLONGAN B DAN C UNTUK PENGECEK DAN PENJUAL LANGSUNG MINUM DI TEMPAT			-
7	SURAT IZIN USAHA PERDAGANGAN	18	OSS	-
BIDANG KOPERASI				
1	IZIN USAHA SIMPAN PINJAM UNTUK KOPERASI			-
2	IZIN KANTOR CABANG, CABANG PEMBANTU DAN KANTOR KAS KOPERASI SIMPAN PINJAM			-
BIDANG PERINDUSTRIAN				
1	IZIN USAHA INDUSTRI (IUI) KECIL DAN IUI MENENGAH	10	OSS	-
2	IZIN PERLUASAN USAHA INDUSTRI(IPUI) BAGI INDUSTRI KECIL DAN MENENGAH			-
3	IZIN USAHA KAWASAN INDUSTRI (IUKI)			-
4	IZIN PERLUASAN KAWASAN INDUSTRI (IPKI) YANG LOKASINYA DI DAERAH KABUPATEN / KOTA			-
B. NON PERIZINAN				
1	PEMBATALAN / PENCABUTAN PERIZINAN	-	-	-
2	PELAYANAN INFORMASI DAN PENANGANAN PENGADUAN PERIZINAN DAN NON PERIZINAN	-	-	-
3	LAPORAN KEGIATAN PENANAMAN MODAL (LKPM)	-	-	-
4	INSENTIF DAERAH DAN / ATAU KEMUDAHAN PENANAMAN MODAL	-	-	-
II. PENERBITAN IZIN MELALUI OSS RBA				
A. LAYANAN PERIZINAN BERBASIS RESIKO				
1	USAHA BESAR	7	OSS RBA	-
2	USAHA MENENGAH	4	OSS RBA	
3	USAHA KECIL	17	OSS RBA	
4	USAHA MIKRO	381	OSS RBA	
JUMLAH		1.153		

3. Pendelegasian Kewenangan Perizinan dan Non Perizinan

Pendelegasian kewenangan penerbitan dan penandatanganan perizinan dan non perizinan kepada Kepala Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja Kabupaten Kepulauan Selayar sebagai berikut:

- a. Peraturan Bupati Kepulauan Selayar Nomor : 69 Tahun 2009 tentang pelimpahan sebagian kewenangan di bidang perizinan dan non perizinan kepada Kantor Pelayanan Terpadu dan Penanaman Modal Kabupaten Kepulauan Selayar.
- b. Peraturan Bupati Kepulauan Selayar Nomor : 20 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Kepulauan Selayar Nomor : 69 Tahun 2009 tentang pelimpahan Sebagian Pelimpahan di bidang Perizinan dan Non Perizinan kepada Kepala Kantor Pelayanan Terpadu dan Penanaman Modal Kabupaten Kepulauan Selayar.
- c. Peraturan Bupati Kepulauan Selayar Nomor : 27 Tahun 2014 tentang pelimpahan Sebagian Kewenangan di bidang Perizinan dan Non Perizinan kepada Kepala Kantor Pelayanan Terpadu dan Penanaman Modal Kabupaten Kepulauan Selayar.

BAB IV

PENUTUP

Pengukuran dan evaluasi kinerja terhadap program dan kegiatan yang telah dilaksanakan adalah sangat diperlukan, hal ini guna mengetahui tingkat keberhasilan yang telah dicapai dan sekaligus memberikan laporan pertanggungjawaban terhadap publik pada umumnya dan kepada pimpinan pada khususnya.

Berdasarkan pengukuran pencapaian kinerja sasaran dan kinerja kegiatan yang telah dilakukan, bahwa Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu, dan Tenaga Kerja Kabupaten Kepulauan Selayar sudah berupaya dengan optimal dan telah dapat berhasil melaksanakan program dan kegiatan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan sebelumnya. Terlihat dari prosentase tingkat pencapaian target sasaran dengan nilai antara 80% sampai dengan 100 %.

1. Kendala

- a. Peluang investasi yang dipromosikan belum menggambarkan permintaan pasar yang membuat calon investor tertarik berinvestasi di Kabupaten Kepulauan Selayar;
- b. Regulasi yang ada di tingkat lebih atas sering berubah sesuai perkembangan dan penyesuaian dengan kondisi yang terkini;
- c. Proyek-proyek yang ditawarkan/dikerjasamakan belum didukung oleh pemberian insentif dari Daerah;
- d. Belum optimal proses pelayanan PTSP pada pelayanan perizinan sesuai dengan SOP karena kewenangan perlengkapan persyaratan perizinan ada pada PD pemberi rekomendasi;
- e. Belum semua investor membuat laporan /LKPM melalui kepala DPMPTSPK;
- f. Terlalu banyaknya perizinan yang harus dipenuhi oleh pengusaha dalam rangka menanamkan investasi;

- g. Kondisi masyarakat yang belum sepenuhnya mendukung terhadap perkembangan investasi.

2. Solusi

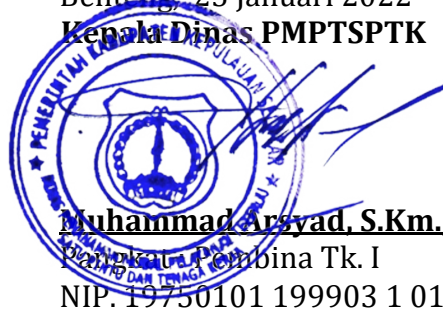
Guna mencapai target kinerja sasaran organisasi dan menghadapi berbagai kendala yang dihadapi, berbagai upaya yang akan dilakukan untuk mengatasi kendala tersebut, antara lain :

- a. Pengkajian dan penyempurnaan produk hukum yang berkaitan dengan penyelenggaraan pelayanan perizinan secara terpadu;
- b. Melakukan Penataan SDM sesuai dengan potensi dan peningkatan kapasitas sumber daya manusia aparatur;
- c. Melakukan pembenahan pada setiap kegiatan berbasis aplikasi sehingga pelaksanaan, monitoring, evaluasi dan pelaporan hasil kegiatan lebih efisien;
- d. Peningkatan intensitas koordinasi dan konsultasi baik secara horizontal dan vertikal dalam memecahkan berbagai permasalahan dan hambatan yang dihadapi;
- e. Peningkatan fungsi staf sebagai dukungan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi organisasi melalui pengelolaan sumber daya aparatur, keuangan, prasarana, sarana dan pengelolaan aset;
- f. Melakukan koordinasi Kepada Perangkat Daerah pengolah rekomendasi untuk mempedomani SOP PTSP dalam memproses rekomendasi;
- g. Melakukan revisi terhadap regulasi yang mengarah kepada pemberian insentif kepada investor.

Kami menyadari penyusunan Laporan Kinerja Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2021 ini masih jauh dari harapan. Untuk itu saran dan kritik yang sifatnya membangun guna perbaikan penyusunan di masa mendatang kami sangat kami harapkan.

Semoga Laporan Kinerja Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2021 ini dapat bermanfaat bagi semua pihak yang berkepentingan, dan semoga target kinerja yang diinginkan dalam menunjang pencapaian Visi Pembangunan Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar tahun 2021-2026 adalah ***“Kepulauan Selayar Sebagai Bandar Maritim Kawasan Timur Indonesia”*** setiap tahun senantiasa dapat tercapai.

Benteng, 25 Januari 2022
Kepala Dinas PMPTSPK



Muhammad Arsyad, S.Km., M.Kes., M.Sc.PH.
Kepala Dinas PMPTSPK
NIP. 19750101 199903 1 010